

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022



*pemerintah kabupaten manggarai barat
provinsi nusa tenggara timur*



**labuan bajo
2023**



KATA PENGANTAR

Amanat pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporannya kepada Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah diamanatkan, Pemerintah Daerah secara teknis wajib menyusun laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan peraturan pelaksana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

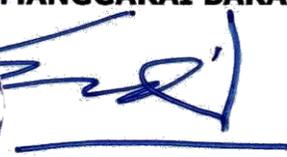
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ini memuat Capaian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang diukur dari rumusan capaian IKK Output dan IKK Outcome sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah menjadi rutinitas tahunan ini dapat menjawab trend perkembangan kinerja pemerintah terutama dalam bidang-bidang pelayanan langsung terhadap masyarakat dengan tuntutan yang semakin meningkat. Akan tetapi capaian kinerja yang telah dilaksanakan masih jauh dari kesempurnaan dan sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat baik melalui Pengalokasian Anggaran maupun penyaluran bantuan lain berupa sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat mempermudah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Akhir kata, laporan ini diharapkan mampu menjawab evaluasi akan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat selama periode waktu 2022 dan kiranya pengantar ini dapat membuka lembaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan semangat pelayanan ke arah perubahan yang lebih baik.

Labuan Bajo, 30 Maret 2022

 **KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

ISTASIVUS ENDI, SE

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Demografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	3
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawaiian Pemerintah..	5
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	16
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	18
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	22
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	29
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	43



BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	67
2.1	Capaian Kinerja Makro.....	67
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	67
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	67
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	125
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	136
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	139
a.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	140
b.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	141
c.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	178
d.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	179
e.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Kabupaten dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.....	180
f.	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Dan Kinerja Yang Telah Dicapai.....	181
g.	Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.....	206
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	222
3.1	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	222
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.....	222

3.3	Permasalahan dan Kendala.....	224
3.4	Saran Dan Tindak Lanjut.....	224
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	225
BAB V	PENUTUP.....	271



1.1 Latar Belakang**1.1.1 Penjelasan Umum****a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Manggarai Barat menjadi sebuah daerah otonom dibentuk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. TAP MPR RI Nomor: IV/MPR/1998 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 2019; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah tertanggal 6 Maret 2020, (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 288).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2).

b. Data Demografis Wilayah

Kabupaten Manggarai Barat terletak pada 08⁰ 14 LS-09⁰.00 LS dan 119⁰.21 BT-120⁰.20 BT dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape

Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas 10.000,47 km² dengan luas daratan 2.974,5 km² dan luas laut 7.052,97 km².

Kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi yang bervariasi dengan tingkat kemiringan ± 30⁰ dengan tingkat curah hujan sedang.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat terbagi atas 12 Kecamatan dan 169 desa/ kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

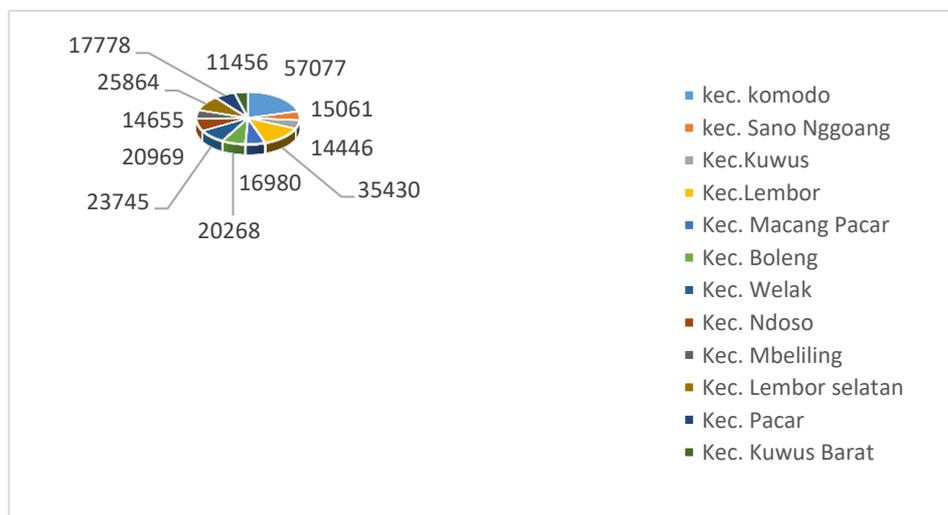
- 1) Kecamatan Komodo terdiri dari 17 Desa dan 2 Kelurahan
- 2) Kecamatan Sano Nggoang terdiri dari 15 Desa
- 3) Kecamatan Kuwus terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa
- 4) Kecamatan Lembor terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa
- 5) Kecamatan Macang Pacar terdiri dari 13 Desa
- 6) Kecamatan Boleng terdiri dari 11 Desa
- 7) Kecamatan Welak terdiri dari 16 Desa
- 8) Kecamatan Ndosso terdiri dari 15 Desa
- 9) Kecamatan Mbeliling terdiri dari 15 Desa
- 10) Kecamatan Lembor Selatan terdiri dari 15 Desa
- 11) Kecamatan Pacar terdiri dari 13 Desa

12) Kecamatan Kuwus Barat terdiri dari 10 Desa

c. Jumlah Penduduk.

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 273.729 jiwa dan 77.665 KK.
2. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 137.885 jiwa dan perempuan sebanyak 135.844 jiwa.
3. Komposisi penduduk menurut kecamatan:
 - a. Kecamatan Komodo sebanyak 57.077 jiwa
 - b. Kecamatan Sano Nggoang sebanyak 15.061 jiwa
 - c. Kecamatan Kuwus sebanyak 14.446 jiwa
 - d. Kecamatan Lembor sebanyak 35.430 jiwa
 - e. Kecamatan Macang Pacar sebanyak 16.980 jiwa
 - f. Kecamatan Boleng sebanyak 20.268 jiwa
 - g. Kecamatan Welak sebanyak 23.745 jiwa
 - h. Kecamatan Ndosso sebanyak 20.969 jiwa
 - i. Kecamatan Mbeliling sebanyak 14.655 jiwa
 - j. Kecamatan Lembor Selatan sebanyak 25.864 jiwa
 - k. Kecamatan Pacar sebanyak 17.778 jiwa
 - l. Kecamatan Kuwus Barat sebanyak 11.456 jiwa

Komposisi Penduduk Menurut Kecamatan.



Sumber Data: Agregat Kependudukan Semester II Th.2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.

4. Komposisi penduduk menurut struktur usia.

1) 0 – 4	= 22.055 orang
2) 5 – 9	= 27.308 orang
3) 10 – 14	= 28.335 orang
4) 15 – 19	= 25.501 orang
5) 20 – 24	= 29.831 orang
6) 25 – 29	= 24.878 orang
7) 30 – 34	= 19.860 orang
8) 35 – 39	= 19.264 orang
9) 40 – 44	= 17.172 orang
10) 45 – 49	= 14.415 orang
11) 50 – 54	= 13.880 orang
12) 55 – 59	= 10.793 orang
13) 60 – 64	= 8.009 orang
14) 65 – 69	= 4.987 orang
15) 70 – 74	= 3.536 orang
16) ≥ 75	= 3.894 orang

5. Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan.

Belum/Tidak Sekolah	: 63.896 orang
Belum Tamat SD/Sederajat	: 37.575 orang
SD/Sederajat	: 88.290 orang
SLTP/Sederajat	: 26.724 orang
SLTA/Sederajat	: 40.369 orang
Diploma I/II	: 1.185 orang
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	: 2.946 orang
Diploma IV/Strata I	: 12.514 orang
Strata II	: 218 orang
Strata III	: 12 orang

6. Keadaan Penduduk berdasarkan Agama.

Islam	: 54.674 orang
Kristen	: 1.901 orang
Katholik	: 216.893 orang
Budha	: 17 orang
Hindu	: 238 orang
Konghuchu	: 1 orang
Lainnya	: 5 orang

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan/Desa/kelurahan	Jumlah
1.	Kecamatan	12
2.	Kelurahan	5
3.	Desa	164

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.

Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

I. SEKRETARIAT DAERAH

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Asisten Administrasi Umum
- e. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- g. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- h. Bagian Tata Pemerintahan
- i. Bagian Hukum

- j. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - l. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - m. Bagian Administrasi Pembangunan
 - n. Bagian Organisasi
 - o. Bagian Umum
 - p. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah
 - q. Bagian Perencanaan Dan Keuangan
- II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- III. INSPEKTORAT DAERAH
- IV. DINAS DAERAH
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Bina Marga, Bina Kontruksi Dan Perhubungan
 - d. Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - f. Dinas Sosial
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - i. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - j. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - k. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - l. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan UKM

- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- q. Dinas Komunikasi dan Informatika
- r. Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

V. BADAN DAERAH

- a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
- c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Badan Pendapatan Daerah

VI. RUMAH SAKIT UMU DAERAH KOMODO

VII. KECAMATAN

- a. Kecamatan Komodo
- b. Kecamatan Lembor
- c. Kecamatan Lembor Selatan
- d. Kecamatan Kuwus
- e. Kecamatan Macang Pacar
- f. Kecamatan Boleng
- g. Kecamatan Mbeliling
- h. Kecamatan Welak
- i. Kecamatan Ndosu
- j. Kecamatan Sanon Nggoang
- k. Kecamatan Kuwus Barat
- l. Kecamatan Pacar

VIII. KELURAHAN

- a. Kelurahan Labuan Bajo
- b. Kelurahan Wae kelambu
- c. Kelurahan Tangge
- d. Kelurahan Nantal
- e. Kelurahan Golo Ru,u

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi
Anggaran Berdasarkan Urusan, Program dan Jenis
Belanja.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada APBD induk tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.411.247.220.124,00 dan setelah perubahan sebesar Rp.1.330.686.744.398,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.1.255.652.663.532,58 atau sebesar 94,36%.

Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.1.628.491.535.318,00 dan pada APBD Perubahan ditargetkan menjadi Rp.1.581.873.367.077,00 dan realisasi sebesar Rp.1.494.280.238.969,32 atau sebesar 94,46%.

Urusan/ Program	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
URUSAN PENDIDIKAN	250.119.841.312	37.497.803.907	0	0	287.617.645.219
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	249.757.888.012	36.579.841.907	0	0	286.337.729.919
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	189.366.293.181	99.373.807	0	0	189.465.666.988
2. Program Pengelolaan Pendidikan	60.232.022.731	36.480.468.100	0	0	96.712.490.831
3. Program Pengembangan Kurikulum	159.572.100	0	0	0	159.572.100
SPNF SKB Manggarai Barat	361.953.300	917.962.000	0	0	1.279.915.300
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	122.158.000	0	0	0	122.158.000
2. Program Pengelolaan Pendidikan	239.795.300	917.962.000	0	0	1.157.757.300
URUSAN BIDANG KESEHATAN	178.184.669.299	119.559.396.903	0	0	297.744.066.202
Dinas Kesehatan	120.010.172.243	7.611.512.250	0	0	127.621.684.493
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.196.446.138	283.718.600	0	0	60.480.164.738
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	44.279.502.055	7.327.793.650	0	0	51.607.295.705
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	14.060.929.000	0	0	0	14.060.929.000
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	217.825.000	0	0	0	217.825.000
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.255.470.050	0	0	0	1.255.470.050
Rumah Sakit Umum Daerah Komodo	44.604.710.464	111.947.884.653	0	0	156.552.595.117
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.331.690.550	218.971.614	0	0	20.550.662.164
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.419.816.188	111.728.913.039	0	0	127.148.729.227
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.853.203.726	0	0	0	8.853.203.726
UPTD Puskesmas Labuan Bajo	2.103.354.000	0	0	0	2.103.354.000
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.103.354.000	0	0	0	2.103.354.000
UPTD Puskesmas Benteng	481.250.000	0	0	0	481.250.000
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	481.250.000	0	0	0	481.250.000
UPTD Puskesmas Rekas	343.517.308	0	0	0	343.517.308
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	343.517.308	0	0	0	343.517.308
UPTD Puskesmas Werang	735.340.496	0	0	0	735.340.496
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	735.340.496	0	0	0	735.340.496
UPTD Puskesmas Warsawe	331.375.000	0	0	0	331.375.000
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	331.375.000	0	0	0	331.375.000

UPTD Puskesmas Wae Nakeng	1.323.597.707	0	0	0	1.323.597.707
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.323.597.707	0	0	0	1.323.597.707
UPTD Puskesmas Datak	480.706.862	0	0	0	480.706.862
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	480.706.862	0	0	0	480.706.862
UPTD Puskesmas Nangalili	466.235.000	0	0	0	466.235.000
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	466.235.000	0	0	0	466.235.000
UPTD Puskesmas Lengkong Cepang	616.637.716	0	0	0	616.637.716
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	616.637.716	0	0	0	616.637.716
UPTD Puskesmas Wae Kanta	519.963.158	0	0	0	519.963.158
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	519.963.158	0	0	0	519.963.158
UPTD Puskesmas Orong	601.481.570	0	0	0	601.481.570
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	601.481.570	0	0	0	601.481.570
UPTD Puskesmas Golo Welu	671.385.000	0	0	0	671.385.000
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	671.385.000	0	0	0	671.385.000
UPTD Puskesmas Rangu	530.901.852	0	0	0	530.901.852
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	530.901.852	0	0	0	530.901.852
UPTD Puskesmas Tentang	625.378.851	0	0	0	625.378.851
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	625.378.851	0	0	0	625.378.851
UPTD Puskesmas Pacar	977.406.188	0	0	0	977.406.188
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	977.406.188	0	0	0	977.406.188
UPTD Puskesmas Bari	440.485.969	0	0	0	440.485.969
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	440.485.969	0	0	0	440.485.969
UPTD Puskesmas Rego	410.670.734	0	0	0	410.670.734
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	410.670.734	0	0	0	410.670.734
UPTD Puskesmas Terang	849.970.993	0	0	0	849.970.993
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	849.970.993	0	0	0	849.970.993
UPTD Puskesmas Waning	330.000.000	0	0	0	330.000.000
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	330.000.000	0	0	0	330.000.000
UPTD Puskesmas Nanga Terang	366.442.204	0	0	0	366.442.204
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	366.442.204	0	0	0	366.442.204
UPTD Puskesmas Wae Pitak	363.685.984	0	0	0	363.685.984
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	363.685.984	0	0	0	363.685.984
UPTD Puskesmas Wae Pitak	363.685.984	0	0	0	363.685.984
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	363.685.984	0	0	0	363.685.984
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	70.994.802.596	326.180.317.726	0	0	397.175.120.322
Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	25.721.342.900	11.119.921.894	0	0	36.841.264.794
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.999.500	0	0	0	9.999.500
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.812.780.700	8.685.556.210	0	0	15.498.336.910
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.292.120.000	0	0	0	11.292.120.000
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.151.870.000	0	0	0	4.151.870.000
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	249.216.900	2.309.250.000	0	0	2.558.466.900
6. Program Pengembangan Permukiman	1.977.431.000	91.450.000	0	0	2.068.881.000
7. Program Penataan Bangunan Gedung	518.303.500	33.665.684	0	0	551.969.184
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	709.621.300	0	0	0	709.621.300
9. Program Pengembangan Permukiman	1.977.431.000	91.450.000	0	0	2.068.881.000
10. Program Penataan Bangunan Gedung	518.303.500	33.665.684	0	0	551.969.184
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	45.273.459.696	315.060.395.832	0	0	360.333.855.528
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.961.620.524	97.912.832	0	0	6.059.533.356
2. Program Penyelenggaraan Jalan	38.689.961.972	314.962.483.000	0	0	353.652.444.972
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	621.877.200	0	0	0	621.877.200
URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	12.865.425.076	1.533.045.000	0	0	14.398.470.076
Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4.631.469.056	0	0	0	4.631.469.056
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.631.469.056	0	0	0	4.631.469.056
Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Pemukiman Dan Perumahan	8.233.956.020	1.533.045.000	0	0	9.767.001.020
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.081.770.920	0	0	0	3.081.770.920
2. Program Pengembangan Perumahan	1.072.115.100	0	0	0	1.072.115.100
3. Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.690.660.000	1.512.200.000	0	0	302.806.000

URUSAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.510.391.951	10.100.000	0	0	10.520.491.951
Satuan Polisi Pamong Praja	7.404.817.140	1.100.000	0	0	7.405.917.140
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.846.136.140	1.100.000	0	0	4.847.236.140
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.476.532.200	0	0	0	2.476.532.200
3. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	82.148.800	0	0	0	82.148.800
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.105.574.811	9.000.000	0	0	3.114.574.811
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.664.098.111	0	0	0	2.664.098.111
2. Program Penanggulangan Bencana	441.476.400	9.000.000	0	0	450.476.500
URUSAN BIDANG SOSIAL	5.080.749.714	129.271.421	0	0	5.210.021.135
Dinas Sosial	5.080.749.714	129.271.421	0	0	5.210.021.135
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.302.183.714	21.161.421	0	0	2.323.345.135
2. Program Pemberdayaan Sosial	181.565.500	0	0	0	181.565.500
3. Program Penangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	137.000	0	0	0	137.000
4. Program Rehabilitasi Sosial	1.141.425.000	0	0	0	1.141.425.000
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	21.761.200	0	0	0	21.761.200
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	52.310.000	0	0	0	52.310.000
URUSAN BIDANG TENAGA KERJA	3.369.848.624	238.608.084	0	0	3.608.456.708
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	3.369.848.624	238.608.084	0	0	3.608.456.708
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.587.943.924	238.608.084	0	0	2.826.552.008
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	29.740.000	0	0	0	29.740.000
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	467.494.400	0	0	0	467.494.400
4. Program Penempatan Tenaga Kerja	207.890.300	0	0	0	207.890.300
5. Program Hubungan Industrial	76.780.000	0	0	0	76.780.000
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIUNDUNGAN ANAK	444.310.000	0	0	0	444.310.000
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	444.310.000	0	0	0	444.310.000
1. Program Pengarusu Taman Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	222.515.000	0	0	0	222.515.000
2. Program Perlindungan Perempuan	23.925.000	0	0	0	23.925.000
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.450.000	0	0	0	66.450.000
4. Program Perlindungan Khusus Anak	131.420.000	0	0	0	131.420.000
URUSAN BIDANG PANGAN	5.246.002.292	39.088.800	0	0	5.285.091.092
Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	5.246.002.292	39.088.800	0	0	5.285.091.092
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.415.745.452	39.088.800	0	0	2.454.834.252
2. Program Pengeolahan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.313.560.000	0	0	0	2.313.560.000
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	333.580.000	0	0	0	333.580.000
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.420.000	0	0	0	35.420.000
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan	147.696.840	0	0	0	147.696.840
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	170.255.000	0	0	0	170.255.000
Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan Pertanian	170.255.000	0	0	0	170.255.000
1. Program Pengelolaan Izin Lokasi	37.895.100	0	0	0	37.895.100
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	29.899.900	0	0	0	29.899.900
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	102.460.000	0	0	0	102.460.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9.503.336.600	1.202.169.000	0	0	10.705.505.600
Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Perrmukiman dan Pertanian	9.503.336.600	1.202.169.000	0	0	10.705.505.600
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.683.177.600	120.000.000	0	0	1.803.177.600
2. Program perencanaan lingkungan hidup	29.899.900	0	0	0	29.899.900
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	511.440.000	0	0	0	511.440.000
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	96.620.000	0	0	0	96.620.000
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	94.500.000	0	0	0	94.500.000
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	55.880.000	0	0	0	55.880.000
7. Program Pengelolaan Persampahan	7.061.719.000	1.082.169.000	0	0	8.143.888.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.503.336.600	1.202.169.000	0	0	10.705.505.600
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.503.336.600	1.202.169.000	0	0	10.705.505.600
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.969.258.718	113.089.668	0	0	3.082.348.386
2. Program Pendaftaran Penduduk	586.187.370	0	0	0	586.187.370
3. Program Pencatatan Sipil	265.134.600	0	0	0	265.134.600
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	96.650.200	0	0	0	96.650.200

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.239.595.159	81.900.000	0	0	10.321.495.159
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.239.595.159	81.900.000	0	0	10.321.495.159
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.932.009.839	30.000.000	0	0	2.962.009.839
2. Program Penataan Desa	168.812.900	0	0	0	168.812.900
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa	25.364.800	0	0	0	25.364.800
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.275.462.820	519.000.000	0	0	6.3273.62.820
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	837.944.800	0	0	0	837.944.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.957.276.853	1.776.284.467	0	0	10.733.561.320
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.957.276.853	1.776.284.467	0	0	10.733.561.320
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.036.319.620	22.202.500	0	0	4.058.522.120
2. Program Pengendalian Penduduk	258.003.200	0	0	0	258.003.200
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.078.794.033	1.219.081.967	0	0	4.297.876.000
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.584.160.000	535.000.000	0	0	2.119.160.000
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	837.944.800	0	0	0	837.944.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.250.468.690	249.555.500	0	0	1.500.024.190
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	1.250.468.690	249.555.500	0	0	1.500.024.190
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LIAJ)	1.059.510.690	249.555.500	0	0	1.309.066.190
2. Program Pengelolaan Pelayaran	190.958.000	0	0	0	190.958.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.250.468.690	249.555.500	0	0	1.500.024.190
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.250.468.690	249.555.500	0	0	1.500.024.190
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.977.531.698	70.321.432	0	0	3.047.853.130
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	366.408.800	190.000.000	0	0	556.408.800
3. Program Aplikasi Informatika	2.438.449.689	20.250.000	0	0	2.458.699.689
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.584.160.000	535.000.000	0	0	2.119.160.000
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	837.944.800	0	0	0	837.944.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.644.676.200	7.053.870.000	0	0	8.698.546.200
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	1.644.676.200	7.053.870.000	0	0	8.698.546.200
1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	38.091.500	0	0	0	38.091.500
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	186.049.200	7.053.870.000	0	0	7.239.919.200
3. Program Pengembangan Ukm	1.342.485.500	0	0	0	1.342.485.500
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.584.160.000	535.000.000	0	0	2.119.160.000
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	837.944.800	0	0	0	837.944.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.925.098.729	0	0	0	3.925.098.729
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.925.098.729	0	0	0	3.925.098.729
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.023.733.659	0	0	0	3.023.733.659
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	53.760.000	0	0	0	53.760.000
3. Program Promosi Penanaman Modal	212.657.270	0	0	0	212.657.270
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	188.195.300	0	0	0	188.195.300
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	426.571.000	0	0	0	426.571.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.844.079.870	0	0	0	2.844.079.870
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.844.079.870	0	0	0	2.844.079.870
1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	549.999.870	0	0	0	549.999.870
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.444.080.000	0	0	0	1.444.080.000
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	850.000.000	0	0	0	850.000.000
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	188.195.300	0	0	0	188.195.300
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	426.571.000	0	0	0	426.571.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	78.807.000	17.500.000	0	0	96.307.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	78.807.000	17.500.000	0	0	96.307.000
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	78.807.000	17.500.000	0	0	96.307.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	44.080.000	0	0	0	44.080.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	44.080.000	0	0	0	44.080.000
1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	44.080.000	0	0	0	44.080.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.782.012.700	20.018.121	0	0	1.802.030.821
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	1.782.012.700	20.018.121	0	0	1.802.030.821
1. Program Pengembangan Kebudayaan	1.533.611.000	18.685.279	0	0	1.552.296.279
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	72.598.100	0	0	0	72.598.100
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	175.803.600	1.332.842	0	0	177.136.442

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1,078,817,300	10.031.200.000	0	0	11.110.017.300
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,078,817,300	10.031.200.000	0	0	11.110.017.300
1. Program Pembinaan Perpustakaan	1,078,817,300	10.031.200.000	0	0	11.110.017.300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.004.268.307	94.776.395	0	0	3.099.044.702
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.004.268.307	94.776.395	0	0	3.099.044.702
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.869.593.607	94.776.395	0	0	2.964.370.002
2. Program Pengelolaan Arsip	68.662.700	0	0	0	68.662.700
3. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	66.012.000	0	0	0	66.012.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.637.324.140	15.000.000	0	0	2.652.324.140
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.637.324.140	15.000.000	0	0	2.652.324.140
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.949.505.000	0	0	0	1.949.505.000
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	551.162.140	15.000.000	0	0	566.162.140
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	122.861.400	0	0	0	122.861.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.999.959.017	223.607.012	0	0	7.223.566.029
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	6.999.959.017	223.607.012	0	0	7.223.566.029
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.939.489.927	25.000.000	0	0	3.964.489.927
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.601.360.090	152.750.668	0	0	1.754.110.758
3. Program Pemasaran Pariwisata	396.968.300	458.563.440	0	0	442.824.644
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	276.087.400	0	0	0	276.087.400
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	786.053.300	0	0	0	786.053.300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	56.363.086.651	8.986.844.501	0	0	65.349.931.152
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	41.711.371.232	1.914.665.096	0	0	43.626.036.328
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.987.059.901	48.721.827	0	0	10.035.781.728
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.070.871.681	2.250.000	0	0	13.073.121.681
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.214.339.400	1.691.341.000	0	0	15.905.680.400
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	641.915.000	0	0	0	641.915.000
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	48.405.000	0	0	0	48.405.000
6. Program Penyuluhan Pertanian	3.748.780.250	172.352.269	0	0	3.921.132.519
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	641.915.000	0	0	0	641.915.000
8. Program Perizinan Usaha Pertanian	48.405.000	0	0	0	48.405.000
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.651.715.419	7.072.179.405	0	0	21.723.894.824
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.857,026,391	419,801,905	0	0	4.276.828.296
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.070.871.681	2.250.000	0	0	13.073.121.681
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.446.580.000	0	0	0	7.446.580.000
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	896.804.433	6.268.700.000	0	0	7.165.504.433
5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.991.435.595	383.677.500	0	0	2.375.113.095
6. Program Penyuluhan Pertanian	3.748.780.250	172.352.269	0	0	3.921.132.519
7. Program Perizinan Usaha Pertanian	31.000.000	0	0	0	31.000.000
8. Program Penyuluhan Pertanian	428.869.000	0	0	0	428.869.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.289.496.235	392.281.561	0	0	3.681.777.796
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.289.496.235	392.281.561	0	0	3.681.777.796
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.580.080.695	127.281.561	0	0	2.707.362.256
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	36.5619.540	265.000.000	0	0	630.619.540
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	225.310.000	0	0	0	225.310.000
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	112.586.000	0	0	0	112.586.000
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.900.000	0	0	0	5.900.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.053.851.000	9.961.922.000	0	0	13.015.773.000
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.053.851.000	9.961.922.000	0	0	13.015.773.000
1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.970.646.000	9.961.922.000	0	0	12.932.568.000
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	51.890.000	0	0	0	51.890.000
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	31.315.000	0	0	0	31.315.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	154.961.200	0	0	0	154.961.200
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	154.961.200	0	0	0	154.961.200
1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.301.200	0	0	0	54.301.200
2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100.660.000	0	0	0	100.660.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	76.803.373.051	38.748.457.090	0	0	80.678.218.760
SEKRETARIAT DAERAH	38.157.792.237	3.255.371.589	0	0	41.413.163.826
Bagian Pemerintahan	464.851.100	39.000.000	0	0	503.851.100
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	308.559.900	39.000.000	0	0	347.559.900



2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	156.291.200	0	0	0	156.291.200
Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.035.409.760	97.039.084	0	0	7.132.448.844
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	390.379.300	97.039.084	0	0	487.418.384
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	6.645.030.460	0	0	0	6.645.030.460
Bagian Hukum	2.227.222.006	126.333.300	0	0	2.353.555.306
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	697.823.006	126.333.300	0	0	824.156.306
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.529.399.000	0	0	0	1.529.399.000
Bagian Perekonomian dan SDA	577.936.800	47.068.740	0	0	625.005.540
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	273.316.200	47.068.740	0	0	320.384.940
2. Program Perekonomian Dan Pembangunan	304.620.600	0	0	0	304.620.600
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.079.900	0	0	0	1.100.079.900
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332.865.700	0	0	0	332.865.700
2. Program perekonomian dan pembangunan	767.214.200	0	0	0	767.214.200
Bagian Umum	23.644.280.671	2.487.982.600	0	0	26.132.263.271
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.644.280.671	2.487.982.600	0	0	26.132.263.271
Bagian Organisasi	667.629.400	0	0	0	667.629.400
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	667.629.400	0	0	0	667.629.400
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	710.635.000	106.209.010	0	0	816.844.010
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	710.635.000	106.209.010	0	0	816.844.010
Bagian Administrasi Pembangunan	1.389.958.400	272.438.855	0	0	1.662.397.255
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	323.955.400	90.452.201	0	0	414.407.601
2. Program perekonomian dan pembangunan	1.066.003.000	181.986.654	0	0	1.247.989.654
Bagian Perencanaan dan Keuangan	339.789.200	79.300.000	0	0	419.089.200
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	339.789.200	79.300.000	0	0	419.089.200
SEKRETARIAT DPRD	38.645.580.814	619.474.120	0	0	39.265.054.934
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.123.050.714	619.474.120	0	0	27.742.524.834
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11.522.530.100	0	0	0	11.522.530.100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	57.769.293.271	2.487.461.979	58.08.659.941	210.288.700.400	276.354.115.591
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.259.928.713	224.058.466	0	0	6.483.987.179
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.067.733.713	197.516.639	0	0	3.265.250.352
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	778.235.200	0	0	0	778.235.200
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.413.959.800	26.541.827	0	0	2.440.501.627
KEUANGAN	44.147.455.606	1.222.242.092	5.808.659.941	210.288.700.400	261.467.058.039
Badan Keuangan dan Aset Daerah	36.394.213.985	910.885.200	5.808.659.941	210.288.700.400	253.402.459.526
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	16.374.092.573	208.885.200	0	0	16.582.977.773
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.268.870.232	417.000.000	5.808.659.941	210.288.700.400	233.783.230.573
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.751.251.180	285.000.000	0	0	3.036.251.180
Badan Pendapatan Daerah	7.753.241.621	311.356.892	0	0	8.064.598.513
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.088.916.021	143.692.085	0	0	5.232.608.106
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.748.400	0	0	0	12.748.400
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.651.577.200	167.664.807	0	0	2.819.242.007
KEPEGAWAIAN	44.147.455.606	1.222.242.092	5.808.659.941	210.288.700.400	261.467.058.039
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.947.281.752	1.041.161.421	0	0	6.988.443.173
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.223.007.352	42.161.421	0	0	3.265.168.773
2. Program Kepegawaian Daerah	2.724.274.400	999.000.000	0	0	3.723.274.400
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.008.546.000	0	0	0	1.008.546.000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.008.546.000	0	0	0	1.008.546.000
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.008.546.000	0	0	0	1.008.546.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.008.546.000	0	0	0	1.008.546.000
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.008.546.000	0	0	0	1.008.546.000
1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	406.081.200	0	0	0	406.081.200
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.446.801.525	354.012.526	0	0	5.800.814.051
INSPEKTORAT DAERAH	5.446.801.525	354.012.526	0	0	5.800.814.051
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.947.583.125	354.012.526	0	0	4.301.595.651
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.229.068.800	0	0	0	1.229.068.800
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	270.149.600	0	0	0	270.149.600
4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.229.068.800	0	0	0	1.229.068.800
UNSUR KEWILAYAHAN	23.997.528.659	28.0518.929	0	0	24.278.047.588
KECAMATAN	23.997.528.659	28.0518.929	0	0	24.278.047.588
Kecamatan Komodo	3.226.891.320	15.000.000	0	0	3.241.891.320
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.068.088.520	15.000.000	0	0	3.083.088.520
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.568.200	0	0	0	13.568.200
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.004.000	0	0	0	84.004.000



4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.830.500	0	0	0	3.830.500
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	26.531.900	0	0	0	26.531.900
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	30.868.200	0	0	0	30.868.200
Kelurahan Labuan Bajo	499.042.500	37.500.000	0	0	536.542.500
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	330.177.800	37.500.000	0	0	367.677.800
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	168.864.700	0	0	0	168.864.700
Kelurahan Wae Kelambu	310.717.500	0	0	0	310.717.500
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	225.809.300	0	0	0	225.809.300
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.908.200	0	0	0	84.908.200
Kecamatan Bolong	1.717.004.596	33.435.684	0	0	1.750.440.280
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.594.048.296	33.435.684	0	0	1.627.483.980
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	14.549.600	0	0	0	14.549.600
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.688.400	0	0	0	84.688.400
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.453.600	0	0	0	2.453.600
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	13.395.600	0	0	0	13.395.600
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.869.100	0	0	0	7.869.100
Kecamatan Mbeliling	1.816.557.763	53.764.261	0	0	1.870.322.024
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.615.559.563	53.764.261	0	0	1.669.323.824
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.741.500	0	0	0	19.741.500
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82.732.200	0	0	0	82.732.200
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.785.600	0	0	0	6.785.600
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	74.565.700	0	0	0	74.565.700
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17.173.200	0	0	0	17.173.200
Kecamatan Sano Nggoang	1.638.210.658	20.445.279	0	0	1.658.655.937
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.482.338.658	20.445.279	0	0	1.502.783.937
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.143.800	0	0	0	28.143.800
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	77.518.200	0	0	0	77.518.200
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.274.500	0	0	0	8.274.500
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	28.620.800	0	0	0	28.620.800
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13.314.700	0	0	0	13.314.700
Kecamatan Lembor	2.952.315.690	0	0	0	2.952.315.690
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.750.113.190	0	0	0	2.750.113.190
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	38.240.000	0	0	0	38.240.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	81.562.500	0	0	0	81.562.500
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.470.000	0	0	0	11.470.000
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	20.840.000	0	0	0	20.840.000
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	50.090.000	0	0	0	50.090.000
Kelurahan Tangge	294.551.200	0	0	0	294.551.200
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	208.166.800	37.500.000	0	0	208.166.800
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	86.384.400	0	0	0	86.384.400
Kecamatan Welak	1.888.515.794	48.152.965	0	0	1.936.668.759
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.770.961.294	48.152.965	0	0	1.819.114.259
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	27.724.200	0	0	0	27.724.200
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	46.534.000	0	0	0	46.534.000
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.593.800	0	0	0	5.593.800
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	24.376.500	0	0	0	24.376.500
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	13.326.000	0	0	0	13.326.000
Kecamatan Lembor Selatan	1.638.534.118	0	0	0	1.638.534.118
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.561.356.518	0	0	0	1.561.356.518
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	51.360.000	0	0	0	51.360.000

3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.940.000	0	0	0	7.940.000
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	17.877.600	0	0	0	17.877.600
Kecamatan Kuwus	1.815.991.208	0	0	0	1.815.991.208
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.717.698.908	0	0	0	1.717.698.908
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.760.000	0	0	0	10.760.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82.037.900	0	0	0	82.037.900
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	826.800	0	0	0	826.800
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	3.400.000	0	0	0	3.400.000
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.267.600	0	0	0	1.267.600
Kelurahan Nantal	217.837.200	0	0	0	217.837.200
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	122.064.000	0	0	0	122.064.000
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	95.773.200	0	0	0	95.773.200
Kelurahan Golo Ruu	167.803.480	0	0	0	167.803.480
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87.187.960	0	0	0	87.187.960
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	80.615.520	0	0	0	80.615.520
Kecamatan Macang Pacar	1.565.802.492	53.828.740	0	0	1.619.631.232
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.421.726.692	53.828.740	0	0	1.475.555.432
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	17.211.200	0	0	0	17.211.200
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	81.312.900	0	0	0	81.312.900
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.845.600	0	0	0	8.845.600
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	28.400.000	0	0	0	28.400.000
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8.306.100	0	0	0	8.306.100
Kecamatan Ndoso	1.278.307.152	0	0	0	1.278.307.152
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.140.365.252	0	0	0	1.140.365.252
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.039.600	0	0	0	13.039.600
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82.106.600	0	0	0	82.106.600
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7.637.900	0	0	0	7.637.900
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	19.989.000	0	0	0	19.989.000
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	15.168.800	0	0	0	15.168.800
Kecamatan Kuwus Barat	1.357.956.968	0	0	0	1.357.956.968
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.237.148.068	0	0	0	1.237.148.068
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.338.100	0	0	0	25.338.100
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	24.195.700	0	0	0	24.195.700
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.100.000	0	0	0	3.100.000
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	45.170.000	0	0	0	45.170.000
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23.005.100	0	0	0	23.005.100
Kecamatan Pacar	1.611.489.020	18.392.000	0	0	1.629.881.020
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.425.887.520	18.392.000	0	0	1.444.279.520
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	11.417.700	0	0	0	11.417.700
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85.007.200	0	0	0	85.007.200
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	68.085.000	0	0	0	68.085.000
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	21.091.600	0	0	0	21.091.600
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.304.022.243	62.370.556	0	0	5.366.392.799
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.304.022.243	62.370.556	0	0	5.366.392.799
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.516.476.576	62.370.556	0	0	2.578.847.132
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	400.130.667	0	0	0	400.130.667
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.366.280.000	0	0	0	1.366.280.000
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	105.425.000	0	0	0	105.425.000
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	78.630.000	0	0	0	78.630.000
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	837.080.000	0	0	0	837.080.000

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 menguraikan beberapa permasalahan strategis pemerintah daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Persentase penduduk miskin yang masih tinggi, yakni mencapai 49.400 orang atau sekitar 17,71% dari jumlah penduduk Manggarai Barat. Rata-rata pendapatan mereka hanya sekitar Rp.340.094,- ke bawah per tahun. Status kota Labuan Bajo sebagai daerah destinasi wisata Super Premium harus bisa digunakan sebaik mungkin sebagai penggerak roda ekonomi bagi daerah yang nantinya akan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada penurunan presentasi penduduk miskin.
- 2) Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, yakni mencapai 3,72% dari total angkatan kerja sebanyak 142.353 orang. Hal ini cukup tinggi untuk kategori daerah wisata Super Premium. Oleh karena itu peluang ini perlu dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Daerah dan juga pihak lainnya untuk bagaimana menggunakan status ini untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak. Sektor-sektor riil seperti UMKM dan jasa merupakan contoh sector yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.
- 3) Angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah, yakni hanya mencapai 7,30 tahun. Ini berarti masyarakat Manggarai Barat secara umum hanya bersekolah sampai dengan kelas 1 SMP. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain kondisi infrastruktur sekolah yang tidak memadai, penyebaran sekolah yang tidak merata, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang belum

terlalu maksimal dan juga factor lain seperti akses ke sekolah yang terbatas karena kondisi ekonomi masyarakat.

- 4) Angka kematian Ibu dan bayi masih cukup tinggi di Kabupaten Manggarai Barat. Walaupun tren AKI dan AKB menurun dalam kurun 3 tahun terakhir, akan tetapi hal ini harus tetap menjadi perhatian serius dari semua pihak. Kondisi ini juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana kesehatan yang belum maksimal. Selain AKI dan AKB, derajat kesehatan masyarakat Manggarai Barat juga belum optimal, hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain : masih rendahnya status gizi masyarakat, masih tingginya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat, masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat, masih rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), belum optimalnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, belum optimalnya sistem informasi kesehatan integrasi, belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), belum optimalnya pelaksanaan program JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga, masih rendahnya ratio akseptor KB, masih rendahnya cakupan peserta KB aktif.
- 5) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 tercatat 0,90 %, walaupun dalam kurun empat tahun sebelumnya bertumbuh pada kisaran angka 5 % dan selalu menunjukkan perkembangan yang positif. Sektor pertanian masih menjadi sector yang berkontribusi cukup besar terhadap struktur ekonomi Manggarai Barat walaupun menunjukkan tren menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selain pandemic Covid19 yang berdampak pada

penurunan aktivitas perkonomian, ada beberapa factor lain yang juga berkontribusi pada belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi di Manggarai Barat, seperti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum maksimal, kondisi infrastruktur perdagangan yang belum optimal dalam mendukung kegiatan perdagangan, masih banyaknya lahan tidur yang tidak digunakan, pengelolaan sector pertanian yang belum maksimal dalam mendukung kegiatan kepariwisataan dan juga pertanian yang belum berioentasi pada bisni atau agribisnis.

- 6) Daya dukung pengembangan usaha terutama infrastruktur dan sarana prasarana pendukung belum maksimal. Hasil pertanian masyarakat belum mampu menjangkau pasar di kota Labuan Bajo akibat infrastruktur jalan yang belum baik dan sarana prasarana pasca panen yang belum tersedia.
- 7) Kompetensi tenaga kerja belum memadai. Hal ini antara lain terlihat dari persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi yang hanya sekitar 0,018% dari total tenaga kerja.
- 8) Terbatasnya infrastruktur pendukung perekonomian, seperti jalan, irigasi, bangunan pasar serta infrastruktur air dan listrik. Jumlah jalan kabupaten yang besar yang menyebabkan tingkat pembangunan dan pemeliharaan jalan pun juga menjadi sangat tinggi. Belum terpilah mana jalan yang benar-benar produktif.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai berikut :

**Visi Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:
"MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP".**

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata "Bangkit" mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata "Bangkit" dimaknai sebagai berikut:
 - a) **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk "*bangun dari tidurnya*" dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian
 - b) **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan kansemua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.
2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

- a) **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimism untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
- b) **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.
- c) **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.
3. **Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap** menunjukkan tekad, semangat dan optimism bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan kearah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk

**Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul,
Tangguh dan Populer.**

**Misi Bupati Manggarai Barat Periode 2016-2021
dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi, yaitu:**

- 1) Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah;
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- 3) Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
- 4) Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

No.	Bidang Urusan	Program
1.	Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.	Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
5.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

6.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
7.	Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran dan Eks Korban Tindak Kekerasan
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)		
8.	Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
9.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pemenuhan Hak Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak
10.	Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan



11.	Bidang Pertanahan	Program Pengelolaan Izin Lokasi
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
12.	Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pengelolaan Persampahan
13.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
15.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
16.	Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pengelolaan Pelayaran



17.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
18.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UKM
19.	Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
20.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
21.	Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
22.	Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi
23.	Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pembinaan Sejarah
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

24.	Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
25.	Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
26.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
27.	Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28.	Bidang Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian

29.	Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
30.	Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
31.	Bidang Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
32.	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan
33.	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
34.	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
35.	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
36.	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
37.	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

38.	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
39.	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
40.	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
41.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan kegiatan yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Manggarai Barat yang berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Rekapitulasi kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen tahunan dituangkan dalam tabel di bawah ini:

No.	NAMA OPD	NAMA KEGIATAN
1.	Dinas Marga, Konstruksi dan Perhubungan	Bina Bina
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		

2.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
		Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Sampah		
3.	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya

		dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan Prasarana Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		

8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
10.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11.	Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah

		Kabupaten/Kota
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
12.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah

		Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
13.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengembangan

		Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
14.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

15.	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
16.	Dinas Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

		Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
21.	Badan Perencanaan, pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengelolaan Barang Milik Daerah
23.	Badan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
25.	Inspektorat	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		Pendampingan dan Asistensi
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

		<p>Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>
		<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>
		<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>
		<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>
27.	Sekretariat DPRD	<p>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p>
		<p>Pembahasan Kebijakan Anggaran</p>
		<p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p>
		<p>Peningkatan Kapasitas DPRD</p>
		<p>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p>
		<p>Fasilitasi Tugas DPRD</p>
		<p>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p>
		<p>Layanan Administrasi DPRD</p>
28.	Sekretariat Daerah	<p>Administrasi Tata Pemerintahan</p>
		<p>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p>
		<p>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p>
		<p>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p>
		<p>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</p>
		<p>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>
		<p>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</p>
		<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
		<p>Administrasi Keuangan dan</p>

		Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Daerah otonom sebagaimana diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya akan tetapi sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sebuah keharusan sebagai upaya dalam mencapai target-target pembangunan yang berskala nasional. Pemerintah Daerah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban dengan menyandingkan keberagaman potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai kearifan lokal.

Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Pusat dan daerah harus berkomitmen untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan cakupan urusan: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial yang pada tataran Pemerintah Pusat dijabarkan lebih operasional oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar diaturlah hal-hal yang berkaitan dengan hak pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara.

Dalam penerapannya Pemerintah Pusat mengatur tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar upaya ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 dengan tujuan untuk mengukur penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui dokumen perencanaan yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah menjabarkan 29 indikator Pelayanan dasar sesuai kebutuhan Permendagri 59 tahun 2021 yang bertujuan agar lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang mana pengukuran akan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan dasar bagi kebutuhan masyarakat.

Dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Manggarai Barat masih jauh dari kesempurnaan. Implementasi indikator pelayanan pada masyarakat belum optimal karena berbagai faktor terutama peningkatan Kebutuhan masyarakat yang belum sesuai dengan ketersediaan Sumber daya pemerintah yang memadai, Adapun pengalokasian anggaran belanja dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak cukup untuk melaksanakan program atau kegiatan di daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib sehingga dari 29 indikator pelayanan dasar yang sudah diamanatkan belum semuanya dapat direalisasikan dengan baik. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 ini diharapkan mampu memberikan gambaran perkembangan penerapan Standar

Pelayanan Minimal di Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2022
Dasar Hukum Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4231);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1513);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 232);

Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. KUA Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022, sebagai dokumen induk perencanaan tahunan daerah. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Secara terperinci proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran perubahan 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran perubahan 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.	Pendapatan Daerah	
5.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.248.181.436.716,-
4.1. 01	Pajak Daerah	Rp. 182.374.604.134,-
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 52.475.585.944,-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp. 2.720.173.212,-
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 10.611.072.426,-
4.2	Pendapatan Transfer	Rp.1.021.462.504.330
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 992.705.134.094,-
4.2.02	Pendapatan transfer Antar Daerah	Rp. 28.757.370.236,-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 75.581.682.199,-
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp. 12.580.027.199,-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp. 63.001.655.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp.1.345.225.623.245,-

Sumber: Perubahan KUA Kabupaten Manggarai Barat 2022

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat disesuaikan dengan visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD tahun rencana dan renstra OPD. Sejalan dengan visi dan misi, sasaran, arah kebijakan dan program Bupati untuk lima tahun ke depan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif.

Dari besaran anggaran dan kesinambungan kebijakan dan program-program yang dilaksanakan dapat diprediksi kemana arah pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022.

Secara terperinci proyeksi proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran perubahan 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran perubahan 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.	Belanja	Rp. 1.596.412.244.924,-
5.1	Belanja Operasi	Rp. 828.019.975.327,-
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 376.573.397.914,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 423.736.543.420,-
5.1.03	Belanja Bunga	Rp. 9.434.631.943,-
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 18.275.402.050,-
5.2	Belanja Modal	Rp. 550.168.733.043,-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.40.539.797.964,-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 162.170.290.249,-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 328.270.976.752,-
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	Rp. 19.187.668.078,-
5.3	Belanja tidak terduga	Rp. 7.934.836.154,-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp. 7.934.836.154,-
5.4	Belanja Transfer	Rp. 210.288.700.400,-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp. 13.929.599.000,-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 196.359.599.000,-
	Total Surplus/(Defisit)	0

Sumber: Perubahan KUA Kabupaten Manggarai Barat 2022

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/ urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

- c. Kebijakan Umum Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Tabel 1.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 259.027.531.679
6.1. 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.9.027.531.679,-
6.1.04	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 250.000.000.000,-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.7.840.909.000,-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp.5.000.000.000,-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.2.840.909.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp.251.186.622.679,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Sumber: Perubahan KUA Kabupaten Manggarai Barat 2022

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 diperoleh dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBD tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 9.027.531.679,- (Sembilan Milyar Dua puluh Tujuh juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat periode RPJMD 2021-2026 merupakan sinergi dari RPJPD Kabupaten

Manggarai Barat 2005-2024 yang memfokuskan pada peningkatan kapasitas dan kinerja sarana dan prasarana umum untuk menunjang pertumbuhan pariwisata, pendidikan, kesehatan dan pengolahan hasil-hasil komoditas manggarai barat yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Arah Kebijakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2022	
Misi 1: Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan Dan Inklusif Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah					
1.	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	Semakin meningkatnya daya tarik pariwisata Manggarai Barat	Peningkatan kualitas daya tarik wisata	Optimalisasi kajian dan pengembangan terhadap potensi destinasi wisata baru	
				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata yang inklusif	
				Penyiapan SDM melalui pemberdayaan komunitas	
				Penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata	
			Peningkatan pemasaran destinasi wisata	Peningkatan promosi pada pasar regional dan global	
					Peningkatan promosi tidak langsung (luring dan daring)
		Terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan	Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan	
				Peningkatan pemanfaatan ekonomi destinasi wisata untuk masyarakat lokal	
				Penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan	
		Penguatan kelembagaan dan kerjasama pariwisata	Integrasi kerjasama dengan sektor-sektor terkait	Integrasi pariwisata dengan Pokdarwis, Bumdes, BUMD dan lembaga usaha lainnya	
Peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium					
Pemanfaatan nilai budaya untuk menopang pariwisata					
Meningkatnya perekonomian masyarakat sektor pariwisata	Pengintegrasian ekonomi masyarakat untuk menopang kegiatan wisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi di sekitar destinasi wisata			
		Fasilitasi pemasaran produk lokal di sekitar destinasi wisata			



			Peningkatan kapasitas produksi ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pelaku Ekraf
				Peningkatan kualitas sarana / teknologi penopang ekraf
				Peningkatan kemudahan terhadap akses bantuan permodalan
				Peningkatan ketersediaan bahan baku produksi
				Pengembangan metode produksi berorientasi bisnis
			Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif	Penerapan standar sertifikasi produk Ekraf
		Meningkatnya kelestarian budaya daerah	Peningkatan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Pengembangan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya
				Peningkatan peran lembaga adat dalam pengembangan nilai budaya
				Peningkatan kolaborasi budaya dengan kegiatan pariwisata
				Optimalisasi identifikasi dan pengelolaan seni budaya
				Peningkatan kelembagaan tata kelola seni budaya
				Penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP	Pembangunan dan pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
				Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	peningkatan kualitas pengelolaan dapodik
				peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
				peningkatan sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan

				peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	peningkatan kompetensi guru peningkatan keprofesian guru peningkatan kompetensi tenaga kependidikan pengembangan kurikulum muatan lokal Pengembangan pendidikan karakter sejak usia dini
			peningkatan daya saing siswa	peningkatan standar isi, standar proses, standar evaluasi dan standar kelulusan di tingkat satuan Pendidikan Fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi peningkatan fasilitas layanan perpustakaan peningkatan koleksi buku perpustakaan peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan pengembangan layanan perpustakaan peningkatan pembinaan perpustakaan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca
			Peningkatan kesadaran membaca masyarakat	Pembudayaan gemar membaca
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas ibu	peningkatan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan peningkatan penanganan komplikasi saat persalinan peningkatan penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas peningkatan kunjungan K1 dan K4
			Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting	penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) peningkatan gizi bayi



				peningkatan Imunisasi dasar Lengkap (IDL)
			Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting	<p>pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil</p> <p>pemenuhan gizi bayi dan balita</p> <p>optimalisasi pemberian PMT</p> <p>peningkatan penerapan PHBS</p>
			peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	<p>peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang</p> <p>peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyakit menular dan tidak menular</p>
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	<p>Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan Kesehatan</p> <p>peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas</p> <p>peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan</p> <p>peningkatan pengawasan obat dan makanan</p>
			peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	<p>peningkatan peran kader kesehatan</p> <p>peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan kesehatan</p>
			Peningkatan cakupan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB)	<p>Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Peningkatan partisipasi/akseptor KB aktif</p> <p>Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB</p> <p>Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh</p>
			Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk	<p>Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Pencegahan kasus pernikahan dini</p> <p>Pengembangan grand design kependudukan</p> <p>Peningkatan pemanfaatan data kependudukan</p>



		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	<p>Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p> <p>Peningkatan pengembangan organisasi kepemudaan</p> <p>Peningkatan fasilitasi dan dukungan terhadap kegiatan keolahragaan</p>	<p>Peningkatan kompetensi pemuda</p> <p>Pembinaan terhadap kelompok pemuda untuk bergerak di sektor ekonomi</p> <p>Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan</p> <p>Fasilitasi pendaftaran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</p> <p>Optimalisasi peran organisasi kepramukaan</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM pelatih</p> <p>Peningkatan pembinaan atlet muda berdasarkan minat dan bakat</p> <p>Peningkatan pengelolaan manajemen olahraga daerah</p>
2.	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	<p>Peningkatan tata kelola penanganan PMKS</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial</p>	<p>Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin</p> <p>Peningkatan upaya rehabilitasi sosial diluar panti</p> <p>Peningkatan pemberdayaan PMKS</p> <p>Peningkatan kapasitas shelter sosial</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Peningkatan kontrak kerjasama dengan lembaga swasta, LSM dan panti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>Peningkatan pembinaan dan peran lembaga sosial masyarakat</p> <p>Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial</p>
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	<p>Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender</p> <p>Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik</p>

				Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas
			Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan
				Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan
				Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan
				Peningkatan fasilitas layanan pengaduan
			Peningkatan perlindungan terhadap anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
				Peningkatan kesadaran hak-hak anak
				Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak
Misi 3: Mengembangkan Daya saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal				
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan ketersediaan irigasi usaha tani
				Perluasan lahan pertanian
				Penurunan alih fungsi lahan
				Peningkatan ketersediaan jalan usaha tani
				Peningkatan sarana pertanian (benih unggul, pupuk, obat-obatan dan sarana penunjang lainnya)
				Penurunan serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
				Penerapan metode pertanian berorientasi agribisnis
			Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
				Peningkatan ketersediaan tanaman produktif
			Peningkatan kualitas produk pertanian	Peningkatan penerapan good handling practices
			Peningkatan produksi hasil ternak	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan
				Peningkatan ketersediaan pakan
				Peningkatan ketersediaan bibit unggul



				Penurunan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis lainnya
			Peningkatan kualitas produk hasil ternak	Peningkatan standarisasi penanganan produk pasca panen
			Peningkatan populasi ternak	Peningkatan kelahiran ternak Peningkatan kesehatan ternak Penurunan tingkat kematian ternak
			Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan Peningkatan sarana penangkapan Peningkatan kapasitas SDM nelayan Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
			Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan ketersediaan pakan bersubsidi Peningkatan ketersediaan bibit unggul Peningkatan akses bantuan modal Peningkatan penguasaan teknologi Peningkatan metode budidaya berorientasi agribisnis Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya
			Peningkatan kualitas produk perikanan	Standarisasi penanganan produk perikanan
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal	Penerapan metode 8Ps marketing-mix (Price, promotion, physical evidence, people, product, process, place, planet)
			Revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan kualitas sarana pasar Peningkatan kapasitas SDM pedagang Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan Pengembangan pasar tertib ukur



		Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Peningkatan nilai produksi IKM	Peningkatan ketersediaan bahan baku secara kontinu
				Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
				Peningkatan sarana produksi
				Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
		Meningkatnya realisasi nilai investasi	Peningkatan minat / daya tarik investasi	Peningkatan standarisasi pengolahan produk IKM
				Identifikasi potensi dan peluang investasi
				Peningkatan promosi potensi investasi
				Pengembangan sistem pelaporan perkembangan usaha
		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Peningkatan kualitas manajerial koperasi	Standarisasi pelayanan perizinan sesuai SOP
				Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi
				Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan omzet usaha mikro	Peningkatan sarana koperasi
				Peningkatan kapasitas produksi
				Peningkatan kualitas produk
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan kapasitas pengolahan produk pertanian	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
				Peningkatan sarana dan prasarana produksi
			Peningkatan pemasaran produk olahan pertanian	Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
				Peningkatan penerapan metode marketing mix (8Ps)
Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan daerah		
		Peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya		
	Peningkatan akses pangan	Peningkatan kemudahan pendistribusian pangan		
		Peningkatan akses informasi pangan		

			Peningkatan pemanfaatan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan lokal
			Peningkatan keamanan keamanan pangan	Penurunan jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas
		Meningkatnya stabilitas harga barang	Peningkatan kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Stabilisasi ketersediaan barang pokok dan barang penting
		Menurunnya pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja
				Pengembangan jaringan penempatan tenaga kerja
			Penurunan permasalahan hubungan industrial	Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan

1.	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan pemeliharaan jalan	
				Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan jalan	
				Peningkatan pemerataan jaringan jalan	
		Meningkatnya ketersediaan air baku	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
				Peningkatan akses air minum	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
		Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan laut	Peningkatan ketersediaan sarana dermaga rakyat dan pelabuhan pengumpan	
					Optimalisasi pengelolaan keselamatan pelayaran angkutan laut
					Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
					Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
					Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan



			Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan	Peningkatan kelaikan angkutan umum Optimalisasi pengelolaan parkir Optimalisasi layanan angkutan darat
		Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
			Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
		Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Optimalisasi kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Meningkatkan pengawasan perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang
			Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Fasilitasi sengkata tanah garapan Fasilitasi sengkata tanah ulayat
			Optimalisasi penyelesaian ganti rugi tanah pembangunan	Peningkatan penggantian ganti rugi tanah pembangunan
			Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Optimalisasi pengawasan pembangunan gedung
			Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi Peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Pencegahan pencemaran air	Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air Minimalisasi penggunaan bahan kimia oleh pelaku usaha dan atau kegiatan Optimalisasi konservasi sumber mata air
		Meningkatnya kualitas udara	Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian emisi gas industri dan kendaraan Pengendalian emisi gas rumah kaca

				Optimalisasi pemantauan kualitas udara
		Meningkatnya kualitas lahan	Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Optimalisasi pengelolaan RTH Optimalisasi pengelolaan flora dan fauna Pengendalian alih fungsi lahan
		Meningkatnya penanganan persampahan	Optimalisasi pengelolaan sampah	Peningkatan pengelolaan sampah 3R Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan Peningkatan cakupan wilayah pelayanan sampah Optimalisasi pengelolaan limbah B3
3.	Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Optimalisasi penanggulangan kebencanaan	Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana baik petugas maupun kelompok masyarakat Peningkatan penyusunan dokumen kebencanaan Optimalisasi pendampingan korban pasca bencana Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
			Peningkatan cakupan layanan penanganan kebakaran	Peningkatan sarana pdan prasarana pemadam kebakaran Penambahan jumlah WMK Penambahan personil pemadam kebakaran
			Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali bencana	Peningkatan capaian pembangunan drainase perkotaan Normalisasi Sungai Penurunan luasan kawasan genangan Peningkatan ketersediaan bangunan penahan longsor Peningkatan ketersediaan bangunan pengaman pantai

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Dan Melayani

1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
				Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
				Peningkatan tindak lanjut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
				Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan
				Pembangunan dan manajemen sistem data kinerja
			Penguatan pelembagaan dan implementasi reformasi birokrasi	Fasilitasi penerapan SAKIP di setiap Perangkat Daerah
				Fasilitasi penerapan 8 area perubahan di setiap perangkat daerah
			Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan sinkronisasi dan penerapan instrumen pengendalian kebijakan
				Peningkatan administrasi kewilayahan
				Peningkatan implementasi kerjasama pemerintah daerah
				Optimalisasi fungsi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran
				Peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan kapasitas manajerial BUMD			
	Peningkatan inventarisasi aset daerah			
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			
	Pengintegrasian sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan			
Peningkatan kapasitas PAD	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (kapal dan restoran) dan retribusi daerah			

				Optimalisasi pengurangan kebocoran potensi PAD
				Optimalisasi peran Perumda Bidadari
			Peningkatan fungsi kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Pengelolaan arsip secara baku
			Percepatan implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Peningkatan kelembagaan pengawasan daerah
			Peningkatan kualitas dan sistem pengawasan daerah	Peningkatan sistem pengendalian intern dii setiap perangkat daerah
				Peningkatan akses dan penyelesaian pengaduan masyarakat
		Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi aplikasi e-government untuk pelayanan publik
				Integrasi aplikasi e-government untuk layanan internal pemerintah daerah
			Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik	Penguatan kapasitas PPID dan PPID pembantu
				Penguatan ruang/media interaksi masyarakat dengan pemerintah daerah
			Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit dalam birokrasi	Pemenuhan pegawai berbasis kebutuhan
				Peningkatan sistem pengendalian kinerja pegawai
				Peningkatan kualitas layanan kepegawaian
				Peningkatan pembinaan terhadap pegawai
				Peningkatan sistem pengembangan kompetensi ASN
		Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan sistem pengendalian dan percepatan kualitas pelayanan publik	Penerapan SP dan SOP
				Penguatan koordinasi dan percepatan SPM
				Pengembangan dan penerapan inovasi daerah
				Pemenuhan kebutuhan dan penerapan PATEN
				Peningkatan fasilitas kecamatan dalam pembangunan desa dan kelurahan



			Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan akses layanan kepada masyarakat secara merata Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan
			Peningkatan dukungan kinerja DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD
			Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa Optimalisasi kewenangan lokal berskala desa
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa Optimalisasi kewenangan lokal berskala desa
			Peningkatan pengelolaan potensi desa	Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa Peningkatan pembinaan lembaga desa
			Peningkatan peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa	Peningkatan pembinaan lembaga desa Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa
3.	Terwujudnya kondusivitas sosial masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan kerukunan hidup masyarakat	Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini pada gangguan stabilitas sosial masyarakat	Optimalisasi peran Forum Kerjasama Organisasi Masyarakat (FK Ormas), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme
			Peningkatan budaya politik masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan bantuan pendidikan politik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum



			Peningkatan penegakan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak peraturan
Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Periode (2021-2026).				

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro.

Indikator Kinerja Makro Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	64,17	64,92	1,169
2	Angka Kemiskinan	17,92	17,15	-4,297
3	Angka Pengangguran	4,94	4,91	-0,607
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,29	4,12	219,380
5	Pendapatan Per Kapita	13.915.992	14.728.113	5,836
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,346	0,334	-3,468

Sumber Data BPS Kabupaten Manggarai Barat

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	59 PAUD	Dinas PPO
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda	0	Dinas PPO
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda	4.200 BOP	Dinas PPO
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sda	246	Dinas PPO
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sda	290 pendidik	Dinas PPO

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Sda	29 pendidik	Dinas PPO
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	Sda	13 kepek	Dinas PPO
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sda	229 (SD=137 dan SMP=92)	Dinas PPO
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda	0	Dinas PPO
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda	0	Dinas PPO
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda	31.550 peserta didik	Dinas PPO

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda	18.208 peserta didik	Dinas PPO
		13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sda	2,635	Dinas PPO
		14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	1,817	Dinas PPO
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sda	2.352 pendidik	Dinas PPO
		16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	1.676 pendidik	Dinas PPO
		17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sda	526	Dinas PPO
		18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	288	Dinas PPO
		19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Sda	423 pendidik	Dinas PPO

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sda	251 pendidik	Dinas PPO
		21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda	2.352 pendidik	Dinas PPO
		22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sda	1.676 pendidik	Dinas PPO
		23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda	238 kepek	Dinas PPO
		24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda	94	Dinas PPO
		25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sda	114 orang	Dinas PPO
		26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sda	115 orang	Dinas PPO
		27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sda	1	Dinas PPO
		28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sda	0	Dinas PPO

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sda	140 peserta didik	Dinas PPO
		30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda	92	Dinas PPO
		31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sda	49 orang	Dinas PPO
		32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sda	49 orang	Dinas PPO
		33	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sda	238	Dinas PPO
		34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sda	6 orang	Dinas PPO
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	2 (RSUD Komodo dan Siloam Hospital)	Dinas Kesehatan
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sda	2 (RSUD Komodo dan Siloam Hospital)	Dinas Kesehatan
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	117.852 dari 28 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sda	458 Orang	Dinas Kesehatan
		5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	115.582 dari 45 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sda	477 Orang	Dinas Kesehatan
		7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	23.608 dari 16 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sda	423 Orang	Dinas Kesehatan
		9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	21.959 dari 21 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sda	277 orang	Dinas Kesehatan
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	985 dari 55 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sda	149 Orang	Dinas Kesehatan
		13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	141 dari 4 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	189 Orang	Dinas Kesehatan
		15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	21.948 dari 4 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	331 Orang	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	88 dari 1 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22 Orang	Dinas Kesehatan
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	88 dari 1 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22 Orang	Dinas Kesehatan
		13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	18.000 dari 1 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	23 Orang	Dinas Kesehatan
		15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	47.900 dari 6 Jenis Logistik	Dinas Kesehatan
		16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	50 Orang	Dinas Kesehatan
		17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sda	1 Paket	Dinas Kesehatan
		18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sda	22 Orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	86,16 Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sda	62.300	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sda	35,34 Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sda	30750 m	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak (0)	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak	Tidak (0)	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	111	Dinas PUPR
		8	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100 \%$	69,429 %	Dinas PUPR
		9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100 \%$	59,097 %	Dinas PUPR
		10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		11	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Sda	Ada	Dinas PUPR
		12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/Tidak	Tidak Ada	Dinas PUPR
		13	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	Ada/Tidak	Ada	Dinas PUPR
		14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		15	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	37.495	Dinas PUPR
		17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sudah cukup jelas	37.495	Dinas PUPR
		18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Sudah cukup jelas	379	Dinas PUPR
		21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sudah cukup jelas	379	Dinas PUPR
		22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR
		23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR
		24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100 \%$	75,139 %	Dinas PUPR
		25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR
		26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR
		27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR
		28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kab/Kota}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah di sedot}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100 \%$	0 %	Dinas PUPR
		30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}}$	2,157 %	Dinas PUPR
		31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas	141	Dinas PUPR
		32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Dinas PUPR
		33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Ada	Dinas PUPR
		34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	0	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		38	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	1226.89 KM	Dinas PUPR
		39	Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	3,140	Dinas PUPR
		40	Panjang jembatan yg dibangun	Sudah cukup jelas	40 M	Dinas PUPR
		41	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		42	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		43	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Sudah cukup jelas	134.777	Dinas PUPR
		44	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sudah cukup jelas	30 M	Dinas PUPR
		45	Panjang jalan yang dipelihara	Sudah cukup jelas	1.250	Dinas PUPR
		46	Panjang jembatan yang dipelihara	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		47	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	26	Dinas PUPR
		48	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/ analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	26	Dinas PUPR
		49	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	44	Dinas PUPR
		50	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		51	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		53	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		54	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		55	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	100	Dinas PUPR
		56	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Sudah cukup jelas	26	Dinas PUPR
		57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Sudah cukup jelas	26	Dinas PUPR
		58	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	26	Dinas PUPR
		59	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		60	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		61	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		62	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		63	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		64	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	273	Dinas PUPR
		65	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		66	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		67	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		68	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		69	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		70	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
		71	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	0	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	27 unit	Dinas PRKP
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	27 unit	Dinas PRKP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Sudah cukup jelas	58,54 Ha	Dinas PRKP
		17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sudah cukup jelas	141 Unit	Dinas PRKP
		18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Sudah cukup jelas	5,443 Ha	Dinas PRKP
		19	Jumlah rumah di kab/kota	Sudah cukup jelas	64,033	Dinas PRKP
		20	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sudah cukup jelas	40,466	Dinas PRKP
		21	Jumlah rumah tidak layak huni	Sudah cukup jelas	23,567	Dinas PRKP
		22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sudah cukup jelas	23,567	Dinas PRKP
		23	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100 \%$	73.70 %	Dinas PRKP
		24	Jumlah rumah pembangunan baru	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	28,520	Dinas PRKP
		26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sudah cukup jelas	15,711	Dinas PRKP
		27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sudah cukup jelas	28,520	Dinas PRKP
		28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sudah cukup jelas	10,566	Dinas PRKP
		31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		32	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
		33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sudah cukup jelas	tidak ada	Dinas PRKP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	139	Sat. Pol PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sudah cukup jelas	1.399 Orang	Sat. Pol PP
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sudah cukup jelas	41 Perda	Sat. Pol PP
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sudah cukup jelas	1 Orang	Sat. Pol PP
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada/Tidak	Ada	Sat. Pol PP
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada/Tidak	Ada	Sat. Pol PP
		7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100 \%$	100 %	Sat. Pol PP
		9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen rekon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berda di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berda di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100 \%$	0 %	Sat. Pol PP
		17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100 \%$	15,625 %	Sat. Pol PP
		18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100 \%$	100 %	Sat. Pol PP
		19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Sat. Pol PP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Sudah cukup jelas	0	Sat. Pol PP
		21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada/Tidak	0	Sat. Pol PP
		22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sudah cukup jelas	0 (belum ada)	Sat. Pol PP
		23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sudah cukup jelas	2 Jenis	Sat. Pol PP
		24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sudah cukup jelas	9 Orang	Sat. Pol PP
		25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sudah cukup jelas	1.399 Orang	Sat. Pol PP
		26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	0	Sat. Pol PP
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	2 Aplikasi	Dinas Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Sudah cukup jelas	16.347 Jiwa	Dinas Sosial
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sudah cukup jelas	30 Orang	Dinas Sosial
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sudah cukup jelas	16.347 Jiwa	Dinas Sosial
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	1 Unit	Dinas Sosial
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sudah cukup jelas	193 Orang	Dinas Sosial
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sudah cukup jelas	1 Unit	Dinas Sosial
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sudah cukup jelas	27 Orang	Dinas Sosial
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Sudah cukup jelas	141 Orang	Dinas Sosial
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Sudah cukup jelas	72 Orang	Dinas Sosial
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sudah cukup jelas	1 Kegiatan	Dinas Sosial
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sudah cukup jelas	9 Orang	Dinas Sosial
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Sudah cukup jelas	509 Orang	Dinas Sosial
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Sudah cukup jelas	26 Orang	Dinas Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sudah cukup jelas	26 Orang	Dinas Sosial
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah cukup jelas	475 Orang	Dinas Sosial
		23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sudah cukup jelas	475 Orang	Dinas Sosial
		24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Sosial
		26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/Tidak	Tidak Ada	Dinas Sosial
		27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Sudah cukup jelas	1	Dinas Sosial
7	Ketenagakerjaan	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	1 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator}}{\text{target indikator}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	28 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100 \%$	70,00 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100 \%$	75,00 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}}$	0,056	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		7	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		9	Jumlah penganggur yang dilatih	Sudah cukup jelas	306 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100 \%$	82,36 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		11	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100 \%$	61,48 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		12	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100 \%$	82,36 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{ CPMI dilatih}}{\Sigma \text{ CPMI terdaftar}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		16	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100 \%$	36,36 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100 \%$	36.36 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100 \%$	48.67 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	3.39 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		23	Jumlah mogok kerja	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		24	Jumlah penutupan perusahaan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Jumlah perselisihan kepentingan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		27	Jumlah perselisihan PHK	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	Tidak Ada	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Sudah cukup jelas	306 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	2 BKK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	10 PK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sudah cukup jelas	1 IPK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma \text{ CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma \text{ CPMI/CTKI}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{ Fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{ PMI yang pulang}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\Sigma \text{ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\Sigma \text{ PMI/TKI}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{ PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{ LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
		3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	1 Media Cetak	Dinas PP, KB dan PA
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
		5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak ditingkat Kab/Kota}} \times 100 \%$	100 %	Dinas PP, KB dan PA
		6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	1 lembaga	Dinas PP, KB dan PA
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	Sudah cukup jelas	1 lembaga	Dinas PP, KB dan PA
		8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	1 organisasi (8 kader)	Dinas PP, KB dan PA
		9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Sudah cukup jelas	8 kader	Dinas PP, KB dan PA
		10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	1 lembaga	Dinas PP, KB dan PA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	1 lembaga	Dinas PP, KB dan PA
		12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sudah cukup jelas	1 perbup	Dinas PP, KB dan PA
		13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Sudah cukup jelas	0	Dinas PP, KB dan PA
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100 \%$	100	Dinas PP, KB dan PA
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada (1 unit)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada (13 kelompok tani)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada (8 kelompok)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada (1 dokumen)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada (1 dokumen)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada (5 kali sidak)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	<p>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee $\times 100 \%$</p> <p>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</p>	0 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		4	Dokumen Izin membuka tanah	<p>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak $\times 100 \%$</p> <p>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</p>	0 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<p>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik $\times 100 \%$</p> <p>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</p>	0 %	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH) d. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	<p>Indeks Kualitas Air (IKA)</p> <p>Nilai Realatif = $\frac{Ci}{Lij}$</p> <p>$IP = \frac{\sqrt{(Ci/Lij)^2 Rata - Rata + (Ci/Lij)^2 Maksimum}}{2}$</p> <p>Rumus Metode IP :</p> <p>$0 \leq PIj \leq 1,0 \rightarrow Baik$ (memenuhi baku mutu)</p> <p>$1,0 < PIj \leq 5,0 \rightarrow Cemar ringan$</p> <p>$5,0 < PIj \leq 10,0 \rightarrow Cemar sedang$</p> <p>$PIj > 10,0 \rightarrow Cemar berat$</p>	52.11 87.55 70.42	Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
				$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $IKU = 100 - [50/0,9 \times (Ieu - 0,1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan		
		2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah. 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah. 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan.	0.40 20.80% 0.00%	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
		4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100 \%$	0.000543 %	Dinas Lingkungan Hidup
		5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Terfasilitasnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Lingkungan Hidup
		8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Lingkungan Hidup
12	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100 \%$	80.83 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100 \%$	44.34 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4	Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten Kota dalam satu tahun}}{\text{2 kali}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	0	BPMPD
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sda	0	BPMPD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sda	0	BPMPD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sda	0	BPMPD
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Ada	Dinas PP, KB dan PA
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Sudah cukup jelas	21 MUKP	Dinas PP, KB dan PA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_f} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	25,21	Dinas PP, KB dan PA
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100 \%$	152,98 %	Dinas PP, KB dan PA
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sudah cukup jelas	43 stakeholder	Dinas PP, KB dan PA
		6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100 \%$	326,923 %	Dinas PP, KB dan PA
		7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$	61,28 %	Dinas PP, KB dan PA
		8	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	192 KKBPK	Dinas PP, KB dan PA
		9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas PP, KB dan PA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	14,793 %	Dinas PP, KB dan PA
		11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100 \%$	10,853 %	Dinas PP, KB dan PA
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan type C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perhubungan
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perhubungan
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perhubungan
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perhubungan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
16	Komunikasi & Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	80,49 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$ Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	60,98 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ya atau tidak	Ya	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan dominan dan sub dominan instansi penyelenggara negara sesuai dengan PM kominfo No.5/2015 $\frac{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring}}{\text{Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	97,56 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100 \%$	15,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100 \%$	78,95 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	19,51 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	19,51 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	41,46 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100 \%$	54,84 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100 \%$	34,15 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100 \%$	19,35 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada atau Tidak	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\sum \text{Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah Kabupaten}} \times 100 \%$	89,80 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\sum \text{Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{Deseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{Deseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi & UKM	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam}} \times 100 \%$	2.94 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerimaan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	54.42 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100 \%$	8.84 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	33.33 %	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100 \%$	33.33 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	2.04 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	1.36 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0.68 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		10	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	2.04 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	2.04 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0.68 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		13	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100 \%$	9.15 %	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		14	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		15	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100 \%$	9.97 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100 \%$	0.62 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		18	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	1.04 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		19	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	0.92 %	Dinas Perindagkop dan UKM
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	0	DPMPTSP
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	8 Kali	DPMPTSP
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 Kali	DPMPTSP
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	19 orang	DPMPTSP
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	7.346 Izin	DPMPTSP
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Rp10.352.635.125.824	DPMPTSP
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	3 Orang	DPMPTSP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	142 Perusahaan	DPMPTSP
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	50	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100 peserta	Dinas PPO
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0 (tidak ada)	Dinas PPO
		3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	50 peserta	Dinas PPO
		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0 (tidak ada)	Dinas PPO
		5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	18 orang	Dinas PPO
		6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	10 event OR	Dinas PPO
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	BP4D
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	21	BP4D
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	48	BP4D
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	BP4D

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	BP4D
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100 \%$	0	BP4D
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100 \%$	0	BP4D
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100 \%$	33,33 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100 \%$	33,33 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100 \%$	9,76 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemerinkotan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemuqaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi denqan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudavaan. dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	0,16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100 \%$	11,92 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}}$	0.07	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	32,619	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	402 Koleksi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statistik}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kabupaten}} \times 100 \%$	0.00 %	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kab/Kota}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelemahan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	2 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	91.310 Ekor	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	303	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	60.770 wisman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Event	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100 \%$	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1.760.453,48	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		2	Prasana pertanian yang digunakan	Jumlah prasana pertanian yang digunakan	396 Unit	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Tidak Ada	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		4	Persentase prasana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasana yang dibangun}} \times 100 \%$	78,26 %	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100 \%$	0	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100 \%$	103,67 %	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	0	KPH Manggarai Barat
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	0	KPH Manggarai Barat
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	0	KPH Manggarai Barat
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	0	KPH Manggarai Barat
29	Energi Sumber Daya Mineral	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}} \times 100 \%$	16,67 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri: $\frac{\text{Jumlah STPW untuk menerima waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk menerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100 \%$ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100 \%$ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri : $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100 \%$	0 % 0 % 0 %	Dinas Perindagkop dan UKM Dinas Perindagkop dan UKM Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1 x 24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	18,00 % 18 3 15	Dinas Perindagkop dan UKM
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100 \%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan</p> <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan</p> <p>b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)</p> <p>c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	40,48 % 7.506,83 18.544,47	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		10	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab/Kota}} \times 100 \%$	14,16 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
31	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	<p>Capaian target tahapan penyelesaian RPIK</p> <p>Tahapan :</p> <p>a) Tersusunnya naskah akademik (30%)</p> <p>b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)</p> <p>c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)</p> <p>d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)</p> <p>e) Penetapan Perda RPIK (10%)</p> <p>Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK</p>	0	Dinas Perindagkop dan UKM
		3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
		5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota}} \times 100 \%$	0 %	Dinas Perindagkop dan UKM
32	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	2 pemukiman transmigrasi	Transmigrasi Longge dan Transmigrasi Nggorang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2 pemukiman transmigrasi	Transmigrasi Longge dan Transmigrasi Nggorang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 pemukiman transmigrasi	Transmigrasi Longge	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{3,966}{10,583} \times 100 = 37.48 \%$	Dinas PPO
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{27,325}{32,848} \times 100 = 83.19 \%$	Dinas PPO
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{13,467}{19,273} \times 100 = 69.87 \%$	Dinas PPO
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{180}{65,500} \times 100 = 0.27 \%$	Dinas PPO
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	$\frac{215}{266,336} \times 100 = 0.08 \%$	Dinas Kesehatan
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{2}{3} \times 100 = 66.667 \%$	Dinas Kesehatan
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{4,386}{6,127} \times 100 = 71.58 \%$	Dinas Kesehatan
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{4,780}{5,848} \times 100 = 81.74 \%$	Dinas Kesehatan
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{4,763}{4,880} \times 100 = 97.60 \%$	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{21.094}{34.031} \times 100 = 61,98 \%$	Dinas Kesehatan
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{15.481}{16.032} \times 100 = 96,56 \%$	Dinas Kesehatan
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{131.598}{164.418} \times 100 = 80,04 \%$	Dinas Kesehatan
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{12.155}{24.735} \times 100 = 49,14 \%$	Dinas Kesehatan
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{20.721}{32.568} \times 100 = 63,62 \%$	Dinas Kesehatan
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{3.092}{3.188} \times 100 = 96,99 \%$	Dinas Kesehatan
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{574}{584} \times 100 = 98,29 \%$	Dinas Kesehatan
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{2.034}{2.034} \times 100 = 100 \%$	Dinas Kesehatan
		14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{4.687}{4.687} \times 100 = 100 \%$	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{86,16}{273,960} \times 100 = 31,45 \%$	Dinas PUPR
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{35}{210} \times 100 = 16,83 \%$	Dinas PUPR
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{19.515}{36.479} \times 100 = 53,50 \%$	Dinas PUPR
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{199.157}{258.776} \times 100 = 76,96 \%$	Dinas PUPR
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{37.495}{49.886} \times 100 = 75,16 \%$	Dinas PUPR
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{1.519}{1.570} \times 100 = 96,75 \%$	Dinas PUPR
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{628,170}{1.226,89} \times 100 = 51,20 \%$	Dinas PUPR
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{44}{50} = 0,88$	Dinas PUPR
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{96}{96} \times 100 = 100 \%$	Dinas PUPR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	27	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKP
				27		
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	x 100 = 0.00 %	Dinas PRKP
				161		
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditanqani	5,443	x 100 % 9.30 %	Dinas PRKP
58.54						
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	24,086	x 100 = 48.41 %	Dinas PRKP		
		49,758				
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	28,520	x 100 = 57.32 %	Dinas PRKP		
		49,758				
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	15	x 100 = 100 %	Sat. Pol PP
				15		
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	41	x 100 = 100 %	Sat. Pol PP
				41		
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	90	x 100 = 100 %	Sat. Pol PP
90						
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	90	x 100 = 100 %	Sat. Pol PP		
		90				
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	83	x 100 = 100 %	Sat. Pol PP		
		83				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{18}{18} \times 100 = 100\%$	Sat. Pol PP
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12	Sat. Pol PP
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{220}{16.347} \times 100 = 1,35\%$	Dinas Sosial
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{475}{475} \times 100 = 100\%$	Dinas Sosial
7	Ketenagakerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{9}{13} \times 100 = 69,23\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{523}{13.400} \times 100 = 3,90\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{2.296,70}{13.400} \times 100 = 17,14\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{28}{177} \times 100 = 15,819\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{151}{306} \times 100 = 49,346\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{93,050,769,630}{732,312,843,899} \times 100 = 12.71 \%$	Dinas PP, PA dan KB
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{34}{90,506} \times 100 = 0.04 \%$	Dinas PP, PA dan KB
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{61.00}{135,844} \times 100.000 = 0.04$	Dinas PP, PA dan KB
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{100}{142.3} \times 100 = 70.27 \%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKPP
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKPP
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKPP
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{500}{500} \times 100 = 100 \%$	Dinas PRKPP
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKPP
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{0}{0} \times 100 = 0.00 \%$	Dinas PRKPP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	70.47	Dinas Lingkungan Hidup
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{4,991.48}{29,973.30} \times 100 = 16.65 \%$	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{8}{47} \times 100 = 17.02 \%$	Dinas Lingkungan Hidup
12	Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{182,619}{189,303} \times 100 = 96.47 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{28,796}{84,413} \times 100 = 34.11 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{81,043}{91,153} \times 100 = 88.91 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{3}{41} \times 100 = 7.32 \%$	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{63}{93} \times 100 = 67.74 \%$	BPMPD
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{0}{63} \times 100 = 0.00 \%$	BPMPD
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$\frac{3,186}{1,000} = 3.19$	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{22,047}{35,975} \times 100 = 61.28 \%$	Dinas PP, PA dan KB
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{6,110}{35,975} \times 100 = 0.17 \%$	Dinas PP, PA dan KB

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	$\frac{IK1 \text{ Angkutan Jalan} + IK2 \text{ Angkutan Sungai dan Penyebrangan}}{2}$ $IK1 \text{ (Angkutan Jalan)} = \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$ $IK2 \text{ (Angka, Sungai, Danau dan Penyebrangan)} = \frac{\text{Jumlah lintasan penyebrangan yg beroperasi}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyebrangan}}$ $IK1 \text{ (Angkutan Jalan)} = \frac{58}{58} = 1.00$ $IK2 \text{ (Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan)} = \frac{4}{4} = 1.00$ $\text{Rasio Konektivitas Kabupaten} = \frac{1,00 + 1,00}{2} = 1.00$	Dinas Perhubungan
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{1,00 + 1,00}{2} = 2$ $\frac{2 \times 100}{2} = 100$	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi & Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{33}{41} \times 100 = 80.49 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{10}{12} \times 100 = 83.33 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{88,568}{191,970} \times 100 = 46.14 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi & UKM	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{36}{147} \times 100 = 24.49 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{772}{772} \times 100 = 100.00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{530.563.971.133}{484.127.564.079} \times 100 = 109,59 \%$	Dinas PMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{360}{76.425} \times 100 = 0,47 \%$	Dinas PPO
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{36.915}{76.425} \times 100 = 48,30 \%$	Dinas PPO
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	0 (tidak ada)	Dinas PPO
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{20}{41} \times 100 = 48,78 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{20}{41} \times 100 = 48,78 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{22}{33} \times 100 = 66,667 \%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegembiraan membaca masyarakat	Total jumlah pengunjung perpustakaan = 32.619 Jumlah penduduk = 273.729 0,119	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				2	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{6.843.381}{4.523} \times 100 = 15130181,30\%$	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{57.536}{3.234} \times 100 = 1779,10\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{52.102}{57.205} \times 100 = 91,08\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{1.036}{3.405} \times 100 = 30,43\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{68.981.906.879}{2.290.000.000.000} \times 100 = 3,01\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{68.981.906.879}{190.819.870.963} \times 100 = 36,15\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{258.807,10}{40.184,50} \times 100 = 644,05\%$	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{-3.080}{5.725} \times 100 = -53,80\%$	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
28	Energi Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	Dinas PMPTSP
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalavan)	$\frac{30}{30} \times 100 = 100\%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{7.506,83}{20.604,97} \times 100 = 36,43\%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{47}{332} \times 100 = 14,16\%$	Dinas Perindagkop dan UKM
30	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{948}{39} \times 100 = 2430,8\%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$	Dinas Perindagkop dan UKM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00 \%$	Dinas Perindagkop dan UKM
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	Dinas Perindagkop dan UKM
31	Transmigrasi	1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Trasmigrasi Longge dan Transmigrasi Nggorang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{126,104,903,347.00}{1,589,714,276,077} \times 100 = 7.93 \%$	Dinas PKAD
		2	Rasio PAD	$\frac{190,816,711,963}{3,611,200,000.00} \times 100 = 5,284.03 \%$	Dinas PKAD
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{190,816,711,963}{3,611,200,000} \times 100 = 5284.03 \%$	Dinas PKAD
4	Opini Laporan Keuangan	Ada (Opini BPK tahun 2012 s/d 2021)	Dinas PKAD		
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1,494,280,238,969.32}{1,628,491,535,318.00} - 1 \times 100 = 91.76 \%$	Dinas PKAD		
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{190,816,711,963.02}{326,531,109,317.00} - 1 \times 100 = 58.44 \%$	Dinas PKAD		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		7	Assets Management	Ya	Dinas PKAD
		8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{9,027,531,679.55}{1,099,242,832,552.24} \times 100 = 0.82 \%$	Dinas PKAD
2	Inspektorat	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 2,6989	Inspektorat
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat berada pada Level 2	Inspektorat
3	Ekonomi Pembangunan dan SDA	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{95,203,895,000}{453,987,835,726} \times 100 = 20.97 \%$	Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA
		2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{505,949,746,109}{1,581,873,367,077} \times 100 = 31.98 \%$	Bagian Ekonomi, Pembangunan dan SDA
4	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{1,248}{26} \times 100 = 4,800 \%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{846}{303} \times 100 = 279.21 \%$	BKPPD
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{250}{1,149} \times 100 = 21.76 \%$	BKPPD
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{41}{924} \times 100 = 4.44 \%$	BKPPD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	
6	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	29	x 100 = 70,73 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				41		
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	11	x 100 = 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
				11		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Secara substantif Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Manggarai Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan. Pengukuran realisasi dan capaian berdasarkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 dan dibandingkan targetnya.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- ❖ indikator positif, apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Realisasi	X	100 %
		Rencana		

- ❖ indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Rencana – (Realisasi - Rencana)	X	100 %
		Rencana		

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1

Interval Nilai dan Predikat Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Ungu
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		
1	2	3	4		
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas					
1	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	60
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas					
2	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,42
		3	Prevalensi Stunting	Persen	17,06
3	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	67,24

Misi/Tujuan		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1		2		3	4
Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal					
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	5	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,76
		6	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	13,4
		7	Indeks Gini	Angka	0,34
		8	Tingkat kemiskinan	Nilai	16,18
		9	Tingkat pengangguran terbuka	Nilai	3,51
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan					
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64.69
6	Menurunnya risiko bencana	11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	161,7
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani					
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65
		13	Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	339.650
8	Meningkatnya kemandirian desa	14	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6074

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022- 2026

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2022 terhadap indikator kinerja utama berjumlah 14 indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2022 masih terdapat penggunaan data realisasi tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum dirilis/diumumkan oleh Kementerian atau lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut. Adapun realisasi dan capaian perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 2.3.3

Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
1		2		3	4	5	6
1	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	60	58,2	97
2	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,42	64,92	100,78
		3	Prevalensi Stunting	Persen	17,06	15,9	106,8
3	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	67,24	58,46	86,94
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	5	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,76	4,12	71,53
		6	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	13,40	14,72	109,85
		7	Indeks Gini	Angka	0,340	0,334	101,76
		8	Tingkat kemiskinan	Nilai	16,18	17,15	91,35
		9	Tingkat pengangguran terbuka	Nilai	3,51	4,91	60,11
5	Meningkatnya kualitas lingkungan	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,69	70,47	108,93

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian		
1	2	3	4	5	6		
hidup							
6	Menurunnya risiko bencana	11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	161,7	151,62	106,23
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	53,79	82,75
		13	Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	339.650	190.816	56,180
8	Meningkatnya kemandirian desa	14	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6074	0,5922	97,50

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

Berikut analisis realisasi dan capaian perjanjian kinerja Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 berdasarkan tujuan dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah, diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pariwisata Inklusif,

Secara garis besar konsep pariwisata inklusif memiliki persamaan dengan konsep pariwisata yang menekankan nilai-nilai keberlanjutan lainnya, seperti wisata ramah disabilitas (accessible tourism), pro-poor tourism, pariwisata sosial, pariwisata berbasis masyarakat, dan pariwisata yang bertanggung jawab.

Kajian indeks pariwisata inklusif Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan dengan maksud mendapatkan suatu gambaran mengenai tingkat inklusivitas pada pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat serta untuk mengetahui tingkat inklusivitas sektor pariwisata berdasarkan 4 aspek, 1) aspek sosial; 2) aspek ekonomi; 3) aspek lingkungan; dan 4) aspek infrastruktur,

Hasil kajian Indeks Pariwisata Inklusif Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4
 Hasil Analisis Data Indeks Pariwisata Inklusif Berkelanjutan

No	Aspek	Indikator	Formula	Penjelasan	Perhitungan	Bobot	Perolehan Skor	Skor Variabel
1	Sosial	Keterlibatan Masyarakat Marjinal dalam Forum Pengembangan Pariwisata	$\text{KMMFP} = \frac{\sum f_{pmm}}{\sum f_{pm}} \times 100\%$	KMMFP = Keterlibatan masyarakat marjinal dalam forum pengembangan pariwisata FPM = Forum pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat marjinal FPM = Forum pengembangan pariwisata	$\text{KMMFP} = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$	10	100	10
		Tingkat Keterlibatan masyarakat marjinal dalam pelatihan pada sektor pariwisata	$\text{KMMFP} = \frac{\sum p_{mm}}{\sum p_m} \times 100\%$	KMMFP = Keterlibatan masyarakat marjinal dalam pelatihan pariwisata PMM = Pelatihan pariwisata yang melibatkan masyarakat marjinal Pm = Pelatihan pariwisata	$\text{KMMFP} = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$	10	100	10
2	Ekonomi	Tingkat masyarakat marjinal lokal sebagai produsen cinderamata pada tahun berjalan	$\text{MMPC} = \frac{\sum p_{mm}}{\sum p_c} \times 100\%$	MMPC = Keterlibatan masyarakat marjinal sebagai produsen cinderamata PMM = Jumlah pengusaha cinderamata skala mikro Pc = Jumlah pengusaha cinderamata	$\text{MMPC} = \frac{350}{352} \times 100\% = 99,4\%$	4	100	4
		Tingkat masyarakat marjinal sebagai pemandu wisata tahun berjalan	$\text{PWM} = \frac{\sum p_{wm}}{\sum p_w} \times 100\%$	PWM = Keterlibatan masyarakat marjinal sebagai pemandu wisata PMM = Jumlah masyarakat marjinal (wanita) sebagai	$\text{PWM} = \frac{4}{469} \times 100\% = 0,8\%$	5	20	1

No	Aspek	Indikator	Formula	Penjelasan	Perhitungan	Bobot	Perolehan Skor	Skor Variabel
				pemandu wisata PW = Jumlah pemandu wisata				
		Tingkat keterlibatan warga lokal kelompok marjinal sebagai pekerja hotel pada tahun berjalan	$\text{MMPH} = \frac{\sum pmm}{\sum pm} \times 100\%$	MMPH = Keterlibatan masyarakat marjinal (perempuan dan disabilitas) pekerja hotel PMM = Jumlah masyarakat marjinal (perempuan dan disabilitas) pekerja hotel Pm = Jumlah masyarakat pekerja hotel	$\text{MMPH} = \frac{228}{664} \times 100\% = 34,3\%$	5	40	2
		Tingkat keterlibatan warga lokal kelompok marjinal sebagai kru kapal wisata pada tahun berjalan	$\text{MMKP} = \frac{\sum kpmm}{\sum kp} \times 100\%$	MMKP = Keterlibatan masyarakat marjinal (perempuan dan masyarakat desa) kru kapal KPMM = Jumlah masyarakat marjinal (perempuan dan masyarakat desa) kru kapal KP = Jumlah masyarakat bekerja sebagai kru kapal	$\text{MMKP} = \frac{\sum kpmm}{\sum kp} \times 100\%$	4	20	0,8
		rata-rata omzet penjualan cinderamata oleh produsen kategori marjinal	rata-rata omzet dari total produsen cinderamata usaha mikro	rata-rata omzet dari total produsen cinderamata usaha mikro	rata-rata omzet dari total produsen cinderamata usaha mikro a. < Rp 1.000.000,00 b. Rp 1.000.000,00 - Rp 2.499.999,00 c. Rp 2.500.000,00 - Rp 3.999.999,00 d. Rp 4.000.000,00 - Rp 4.999.999,00 e. > Rp 5.000.000,00	5	20	1
		rata-rata tingkat hunian penginapan milik warga	$\text{THH} = \frac{\sum kp}{\sum kt} \times 100\%$	THH = Tingkat hunian homestay KP = Jumlah malam kamar terpakai	$\text{THH} = \frac{294}{3285} \times 100\% = 6\%$	5	20	1

No	Aspek	Indikator	Formula	Penjelasan	Perhitungan	Bobot	Perolehan Skor	Skor Variabel
		lokal (homestay) per bulan pada tahun berjalan		KT = Jumlah malam kamar tersedia				
		tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke wisata alam pada tahun berjalan	$TKWA = \frac{\sum kwa-kwatl}{\sum kwatl} \times 100\%$	TKWA = Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata alam KWA = Kunjungan wisata alam tahun berjalan KWATL = Kunjungan wisata alam tahun berjalan tahun lalu	$TKWA = \frac{124348-23994}{23994} \times 100\% = 418\%$	5	100	5
		Tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata pada tahun berjalan	$TKDW = \frac{\sum kdw-kdwtl}{\sum kdwtl} \times 100\%$	TKDW = Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke destinasi Desa Wisata KDW = Kunjungan desa wisata tahun berjalan KDWTL = Kunjungan desa wisata berjalan tahun lalu	$TKDW = \frac{1252-1059}{1059} \times 100\% = 18\%$	5	20	1
		tingkat kunjungan wisatawan ke wisata buatan pada tahun berjalan	$TKWB = \frac{\sum kwb-kwbtl}{\sum kwbtl} \times 100\%$	TKWB = Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata buatan KWB = Kunjungan wisata buatan pada tahun berjalan KWBTl = Kunjungan wisata buatan tahun lalu	$TKWB = \frac{800-1272}{1272} \times 100\% = 37\%$	2	20	0,4
3	Lingkungan	tingkat pelaksanaan kegiatan konservasi	$TPKK = \frac{\sum kk}{\sum 12} \times 100\%$	TPkk = Tingkat pelaksanaan kegiatan konservasi KK = kegiatan konservasi 12 = jumlah bulan dalam 1	$TPKK = \frac{3}{12} \times 100\% = 25\%$	20	40	8

No	Aspek	Indikator	Formula	Penjelasan	Perhitungan	Bobot	Perolehan Skor	Skor Variabel	
				tahun					
4	Infrastruktur	Tingkat kondisi infrastruktur jalan baik	$KIJ = \frac{\sum pjb}{\sum tpj} \times 100\%$	KIJ = Kondisi Infrastruktur Jalan Baik PJB = Total Panjang Jalan Baik TPJ = Total Panjang Jalan	$KIJ = \frac{532.625}{1.226.891} \times 100\% = 42,6\%$	15	60	9	
		Tingkat kondisi dermaga baik	$KD = \frac{\sum db}{\sum d} \times 100\%$	KD = Kondisi Dermaga DB = Total dermaga kondisi baik D = Total dermaga	$KD = \frac{13}{16} \times 100\% = 81\%$	5	100	5	
Total Skor Indeks								58,2	

Sumber : Laporan Akhir kajian IPI berkelanjutan Kab.Manggarai Barat



Adapun simpulan dari hasil kajian berdasarkan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat inklusifitas industri pariwisata pada aspek sosial didasari oleh 2 (dua) variabel, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam forum pengembangan pariwisata dan pelatihan pada sektor pariwisata. Total skor aspek sosial berada kategori sangat inklusif.
- b. Tingkat inklusifitas industri pariwisata pada aspek ekonomi didasari oleh 9 (Sembilan) variabel, yaitu tingkat masyarakat marjinal sebagai: 1) produsen cinderamata, 2) pemandu wisata, 3) pekerja hotel, 4) kru kapal. Selain itu, variabel lainnya ialah 5) rata-rata omzet produsen cinderamata masyarakat marjinal, 6) tingkat hunian homestay, 7) tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata alam, 8) tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke desa wisata, dan 9) tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke wisata buatan. Total skor aspek ekonomi berada pada kategori cukup inklusif.
- c. Tingkat inklusifitas industri pariwisata pada aspek lingkungan didasari oleh variabel tingkat pelaksanaan kegiatan konservasi. Total skor aspek lingkungan berada pada kategori cukup inklusif.
- d. Tingkat inklusifitas industri pariwisata pada aspek linkungan didasari oleh variabel kondisi infrastruktur jalan baik dan kondisi dermaga baik. Total skor aspek infrastruktur berada pada kategori inklusif.
- e. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa skor indeks pariwisata inklusif berkelanjutan Kabupaten Manggarai Barat yaitu 58,2, dimana berada pada kategori cukup inklusif.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan indeks pariwisata inklusif, diantaranya :

- a. Penyusunan rencana tindak lanjut hasil forum dan diskusi bersama masyarakat.
- b. Pelatihan pada sektor pariwisata diikuti tahap sertifikasi kompetensi bagi setiap peserta pelatihan.
- c. Untuk meningkatkan omzet penjualan cinderamata dapat dilaksanakan program pendampingan yang berkelanjutan, dari proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan bagi pelaku produsen cinderamata.

- d. Pelatihan pembuatan cinderamata dapat difokuskan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga pelatihan tersebut menjadi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
- e. Mendorong partisipasi kaum wanita untuk berprofesi sebagai pemandu wisata profesional dengan meningkatkan keamanan pada lingkungan kerja.
- f. Peningkatan keterlibatan kaum wanita sebagai pekerja hotel dengan menyerap dengan menyerap kelompok wanita sebagai terapis spa massage.
- g. Pembuatan peraturan yang mendukung penyerapan kaum disabilitas pada industri pariwisata untuk meningkatkan inklusifitas seperti dihotel, restoran, kafe dan usaha pariwisata lain yang memungkinkan.
- h. Pendataan secara periodik untuk data profesi lainnya di sektor pariwisata, seperti profesi pemanduan (tour guide, dive guide, dan naturalist guide) dan kru kapal. Pedataan yang komprehensif untuk mengetahui tingkat inklusifitas keterlibatan masyarakat, seperti gender, umur, dan tingkat pendidikan,
- i. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan bagi pemilik homestay, seperti pencatatan jumlah tamu, kualitas pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital. Pelatihan juga harus diikuti dengan
- j. indikator keberhasilan, seperti peningkatan jumlah tamu, peningkatan hasil ulasan/review dari tamu, keaktifan akun pada platform pemesanan akomodasi digital.
- k. Mendorong terjalinnya kerjasama antara pengelola homestay dengan pihak biro perjalanan / travel agent.
- l. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan wisata buatan.
- m. Mendorong terjalinnya kerjasama antara pengelola destinasi wisata dan wisata buatan dengan pihak biro perjalanan/travel agent.
- n. Peningkatan kegiatan konservasi lingkungan, seperti optimalisasi pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau, sosialisasi pelestarian lingkungan pada tingkat desa, khususnya desa wisata.
- o. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan dermaga untuk perluasan pergerakan wisatawan. Selain itu, juga diikuti dengan sistem penerangan jalan untuk meningkatkan rasa aman bagi wisatawan.

- p. Penyelenggaraan travel market bagi seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata, seperti pemerintah daerah, asosiasi profesi dan industri (HPI, ASITA, PHRI), dan maskapai penerbagangan.
- q. Penyediaan akses publik ke destinasi wisata, sehingga masyarakat lokal dapat mengakses ke destinasi wisata. Mengingat, salah satu konsep pariwisata inklusif ialah menjadikan masyarakat marjinal sebagai konsumen produk wisata

Tabel 2.3.5
Realisasi dan capaian tujuan meningkatnya
manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	60	58,2	97

Sumber : Laporan Akhir kajian IPI berkelanjutan Kab.Manggarai Barat

Indeks Pariwisata Inklusif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 berdasarkan Laporan Akhir kajian IPI berkelanjutan realisasi 58,2 dari target 60 dengan tingkat capaian 97% , predikat **tinggi**

Berikut data kunjungan Wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Tabel 2.3.6
Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2022

Bulan	Tahun 2022			
	Wisman	Wisnus	Lokal	Jumlah
1	2	3	4	5
Januari	238	5.311	-	5.549
Februari	364	4.100		4.464
Maret	863	11.092	-	11.955
April	1.970	7.946	-	9.916
Mei	3.988	15.977	-	19.965
Juni	6.601	16.370	-	22.971
Juli	10.438	15.332	-	25.770
Agustus	12.041	7.169	-	19.210
September	7.940	6.346	-	14.286
Oktober	6.964	6.895	80	13.939
November	5.360	5.335	97	10.792
Desember	4.003		100	

Bulan	Tahun 2022			
	Wisman	Wisnus	Lokal	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		7.434		11.537
TOTAL	60.770	109.307	277	170.354

Sumber : DISparbudekraf Kab.Manggarai Barat tahun 2022

Dari tabel diatas jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dengan jumlah 170.354 orang jika dibandingkan tahun 2021 sejumlah 60.439 orang. Jumlah PAD sektor pariwisata tahun 2022 sejumlah Rp. 9.430.960.000; dengan persentase sektor pariwisata terhadap PAD 4,94 dari total PAD Kabupaten Manggarai Barat Rp. 190.816.711.963,02

2. Tujuan meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, diukur dengan indikator kinerja utama:
 - *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*
 - *Prevalensi Stunting,*

Tabel 2.3.7

Realisasi dan capaian tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,42	64,92	100,78
2	Prevalensi Stunting	Persen	17,06	15,90	106,80
Rata –rata capaian					103,79

Sumber : BPS Provinsi NTT , Dinas Kesehatan dan Bappeda Kab.Manggarai Barat tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja pada tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia pada tahun 2022 sebesar 103,79 % predikat **sangat tinggi**.

Analisis realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (*masyarakat/penduduk*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Berikut data dan komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 menurut komponen dasar pembentuk IPM

Tabel 2.3.8

Komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Usia Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Riil per Kapita	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5
67,73	12,31	7,80	7,636	64,92

Sumber : BPS Provinsi NTT tahun 2023

IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 64,92 dari target 64,42 dengan tingkat capaian 100,78 % predikat **sangat tinggi**, atau berada pada peringkat 11 dari 22 Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur

- Prevalensi Stunting

Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ *stunted*) dan <-3 SD (sangat pendek / *severely stunted*). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Jumlah balita pendek pada tahun 2021 sebanyak 3.498 orang atau 15,1%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 naik sebesar 0,8 % dari 3.711 orang atau 15,89%

Cakupan balita Stunting (TB/U) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pada tahun 2020-2022 indikator yang dipakai adalah Balita Pendek + Sangat Pendek, sehingga terjadi kenaikan persentase. Terdapat dua faktor yang memengaruhi status gizi secara langsung yaitu asupan nutrisi dan infeksi suatu penyakit. Pada pendataan factor determinan yang dilakukan terhadap 119 anak stunting usia 6-23 bulan didapatkan bahwa pola asuh dan pola makan menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus stunting. Asupan makanan sangat memengaruhi status gizi, apabila tubuh memperoleh asupan nutrisi yang dibutuhkan secara optimal maka pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan

kesehatan akan berlangsung maksimal sehingga status gizi pun akan optimal. Infeksi penyakit berkaitan erat dengan perawatan dan pelayanan kesehatan Infeksi penyakit seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akan mengakibatkan proses penyerapan nutrisi terganggu dan tidak optimal sehingga akan berpengaruh terhadap status gizi.

Berikut data balita stunting Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.9
Data balita stunting Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan	Balita Stunting (TB/U)	
				Jumlah	%
1	2	3	3	4	5
1	Komodo	Labuan Bajo	4.613	588	12,75
		Benteng	1.066	30	2,81
2	Mbeliling	Warsawe	1.021	264	25,86
		Rekas	731	74	10,12
3	Sano Nggoang	Werang	1.132	332	29,33
4	Boleng	Terang	518	49	9,46
		Nanga Terang	611	71	11,62
5	Lembor	Wae Nakeng	2.139	401	18,75
		Wae Kanta	889	226	25,42
6	Lembor Selatan	Nangalili	914	222	24,29
		Lengkong Cepang	1.075	228	21,21
7	Welak	Orong	1.155	260	22,51
		Datak	768	96	12,50
8	Kuwus	Golowelu	1.054	132	12,52
9	Kuwus Barat	Rangu	432	16	3,70
		Wae Pitak	519	199	38,34
10	Ndosso	Tentang	726	99	13,64
		waning	785	50	6,37
11	Pacar	Pacar	720	137	19,03
		Compang	964	68	7,05
12	Macang Pacar	Bari	915	118	12,90
		Rego	602	51	8,47
JUMLAH			23.349	3.711	15,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Manggarai Barat tahun 2023

Prevalensi stunting Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 15,90 dari target 17,06 dengan tingkat capaian 106,80%, predikat **sangat tinggi**.

3. Tujuan meningkatnya Keberdayaan Sosial diukur dengan indikator kinerja utama *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*,

IDG menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan dibidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.

Berikut data perbandingan berdasarkan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Tabel 2.3.10

Realisasi dan capaian tujuan meningkatnya Keberdayaan Sosial

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2		3	4	5	6
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	67,24	58,46 **	86,94

Sumber : BPS Provinsi NTT tahun 2023

Catatan: **) realisasi mengacu tahun sebelumnya (2021) karena data belum dirilis oleh Kementerian terkait

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 58,46 dari target 67,24 dengan tingkat capaian 86,94% dan predikat **tinggi**.

4. Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif diukur dengan indikator kinerja utama :
- Laju pertumbuhan ekonomi
 - PDRB Per Kapita
 - Indeks Gini
 - Tingkat kemiskinan
 - Tingkat pengangguran terbuka

Tabel 2.3.11

Realisasi dan capaian tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,76	4,12	71,53
2	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	13,4	14,72	109,85
3	Indeks Gini	Angka	0,34	0,34	100
4	Tingkat kemiskinan	Nilai	16,18	17,15	91,35
5	Tingkat pengangguran	Nilai	3,51	4,91	60,11

terbuka				
Rata –rata capaian				86,57

Sumber : BPS Provinsi NTT dan BPS Manggarai Barat tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja pada tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif pada tahun 2022 sebesar 86,57% (tinggi).

Analisis realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui pertumbuhan ekonominya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 pada posisi 5,54 persen melambat menjadi 0,9 persen pada tahun 2020, mulai meningkat di tahun 2021 menjadi 1,29 persen dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,12%. Berikut adalah data mengenai laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022.

Tabel 2.3.12
Komponen Laju Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan usaha (persen)
tahun 2022

Sektor PDRB		Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
1		2
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.80
B	Pertambangan dan Penggalian	1.80
C	Industri Pengolahan	0.42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00
F	Konstruksi	14.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.49
H	Transportasi dan Pergudangan	3.89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.71
J	Informasi dan Komunikasi	7.08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.55
L	Real Estate	2.97
M,N	Jasa Perusahaan	0.22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.92
P	Jasa Pendidikan	2.82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2023

Berikut Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran tahun 2022;

Tabel 2.3.13
Komponen Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen) tahun 2022

No	PDRB Menurut Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.70
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5.68
3	Konsumsi Pemerintah	0.43
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.71
5	Perubahan Inventori	-
6	Net Ekspor	-
Laju PDRB		4.12

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dengan realisasi 4,12% dari target 5,76 dengan tingkat capaian 71,53, predikat **sedang** .

- PDRB Per Kapita

Pendapatan regional per kapita adalah pendapatan regional atau pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kabupaten Manggarai Barat juga berpengaruh pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 13.770.000 tahun 2021 naik menjadi Rp 13.910.000 dan tahun 2022 lebih meningkat sebesar Rp 14.720.000. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat yang cukup besar dari tahun 2021 hingga 2022.

PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 14,72 dari target 13,40 dengan tingkat capaian 109,85% , predikat ***sangat tinggi***

- Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Mengukur ketimpangan dengan gini ratio berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh indikator indeks gini. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 0, berarti semakin baik pemerataan pendapatan di suatu daerah atau semakin berkurang ketimpangan pendapatan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 1, berarti semakin besar ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat belum dihitung secara mandiri oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, target RPJMD masih menggunakan indeks gini rata-rata Provinsi NTT. Indeks gini Provinsi NTT berada dalam kategori ketimpangan sedang. Indeks gini ini berada di kisaran 0,30-0,40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi NTT termasuk Kabupaten Manggarai Barat, semakin merata. Walaupun PDRB per kapitanya tergolong

rendah. Pengembangan sektor pertanian dan UKM harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 0,34 dari target 0,34 dengan tingkat capaian 100 % , predikat **sangat tinggi**.

- Tingkat kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti sosial dan budaya. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 mengalami penurunan 17,15% jika dibanding dengan tahun sebelumnya 17,92. Sementara itu data kemiskinan ekstrim tahun 2022 meningkat 9,79% jika dibanding tahun 2021 6,98% artinya naik sampai 3 % lebih. Kemiskinan ekstrim naik karena rata –rata pengeluaran penduduk Manggarai Barat dibawah Rp. 358.000, jika di bagi 30 hari pengeluaran tidak sampai Rp. 12.000 /hari.

Persoalan kemiskinan tidak hanya terkait jumlah dan persentase penduduk miskin. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Keduanya dapat diukur dengan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin

Berikut data garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Tabel 2.3.14
Tingkat kemiskinan
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

No	Garis Kemiskinan (rupiah/per Kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin(ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4
1	405 746	49,95	17,55

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2023

Tingkat kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 17,55% dari target 16,18% dengan tingkat capaian 91,35% , predikat **tinggi**

- Tingkat pengangguran terbuka

Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan kesempatan kerja masih terbatas. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seiring dengan peningkatan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kesehatan dan kemampuan bekerja sesuai dengan keinginan. Kualitas yang rendah ini membuat tenaga kerja tidak tertampung di pasar kerja dan menjadi penganggur. Selain kualitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi. Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi, sektor - sektor tersebut tidak mampu memberi kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja yang berjumlah banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 sejumlah 263.687 orang dengan laju pertumbuhan

penduduk 1,63 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada pada tahun 2022 sebanyak 150.499 orang atau sekitar 95,09 persen dari seluruh angkatan kerja. Sementara itu, sekitar 4,91 persen merupakan penganggur atau mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan yang biasa disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT selama ini masih dipakai sebagai suatu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.3.15
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kegiatan selama seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin
di
Kabupaten Manggarai Barat, Tahun 2022

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
I	Angkatan Kerja	84.924	73.345	158.269
	1 Bekerja	78.400	72.099	150.499
	2 Pengangguran Terbuka	6.524	1.246	7.770
II	Bukan Angkatan Kerja	12.363	26.074	38.437
	1 Sekolah	7.401	9.069	16.470
	2 Mengurus Rumah Tangga	1.699	14.693	16.392
	3 Lainnya	3.263	2.312	5.575
	Jumlah	97.287	99.419	196.706
	Tingkat Pengangguran	7.68	1.70	4.91
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87,29	73,77	80,46

Sumber : BPS Manggarai Barat tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat cenderung fluktuatif dari tahun 2020 sebesar 3,72% di tahun 2021 naik menjadi 4,94% dan tahun 2022 turun menjadi 4,91%. Jumlah pengangguran secara signifikan pada tahun 2022 membuat tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat menjadi cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka juga berkorelasi positif dengan

tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin menurun.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 sebesar 78,52, menurun di tahun 2021 sebesar 73,18 dan meningkat di tahun 2022 sebesar 80,46. Rasio penduduk yang bekerja juga menggambarkan tingkat kesempatan kerja. Semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja maka semakin tinggi tingkat kesempatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 4,91 dari target 3,51 dengan tingkat capaian 60,11% , predikat **rendah**

5. Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diukur dengan indikator kinerja utama *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu:

- a. IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
- b. IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
- c. IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL

Jika ditinjau berdasarkan indikatornya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.3.16

Komponen IKLH Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022

No	Komponen IKLH	Nilai	Angka Rentang	Kategori
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Air	52,11	$50 \leq x < 70$	Sedang
2	Indeks Kualitas Udara	87,55	$70 \leq x < 90$	Baik
3	Indeks Kualitas Lahan	70,42	$70 \leq x < 90$	Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0.376 \times 52,11) + (0.405 \times 87,55) + (0.219 \times 70,42) \\
 &= 19,59336 + 35,45775 + 15,42198 \\
 &= \mathbf{70,47 \text{ (Baik)}}
 \end{aligned}$$

Tabel.2.3.17
Realisasi dan capaian
Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,69	70,47	108,93

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 73,78 dari target 64,69 dengan tingkat capaian 106,23 % , predikat **sangat tinggi**.

- Tujuan Menurunnya risiko bencana, diukur dengan indikator kinerja utama *Indeks Risiko Bencana (IRB)*

IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang

ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 menunjukkan penurunan resiko bencana dengan indeks resiko bencana skor 151,62 (kelas resiko tinggi) jika dibandingkan tahun 2020 skor 165,57 dan tahun 2021 skor 165,02.

Tabel.2.3.18

Realisasi dan capaian tujuan menurunnya risiko bencana

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	161,7	151,62	106,23

Sumber : buku IRBI BNPB tahun 2022

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi (skor) 151,62 dari target 161,7 dengan tingkat capaian 106,23 % , predikat **sangat tinggi**.

Berikut data bencana alam Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022, tersaji pada tabel berikut :

Tabel.2.3.19

Data Bencana alam berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No	Lokasi Kejadian Bencana		Jenis Bencana	Tanggal Kejadian
	Kecamatan	Desa		
1	2	3	4	5
1	Komodo	Warloka	Angin Puting Beliung	23 Februari 2022
2	Komodo	Macang Tanggar	Angin Puting Beliung	19 Juni 2022
3	Komodo	Komodo	Banjir	11 Januari 2022
4	Komodo	Labuan Bajo	Bencana Alam	01 Januari 2022
5	Komodo	Batu Cermin	Bencana Alam	03 Februari 2022
6	Komodo	Wae Kelambu	Kebakaran	05 Januari 2022
7	Komodo	Batu Cermin	Kebakaran	25 Juni 2022
8	Komodo	Labuan Bajo	Kebakaran	30 Juni 2022
9	Komodo	Labuan Bajo	Kebakaran	01 Juli 2022
10	Komodo	Labuan Bajo	Kebakaran	31 Oktober 2022
11	Komodo	Gorontalo	Kebakaran	22 Desember 2022
12	Komodo	Gorontalo	Tanah Longsor	05 Januari 2022
13	Komodo	Gorontalo	Tanah Longsor	04 Februari 2022
14	Komodo	Nggorang	Tanah Longsor	06 Maret 2022
15	Komodo	Komodo	Tanah Longsor	24-Apr-22
16	Komodo	Macang Tanggar	Tanah Longsor	18 Oktober 2022
17	Komodo	Macang Tanggar	Tanah Longsor	18 Oktober 2022
18	Komodo	Macang Tanggar	Tanah Longsor	19 Oktober 2022
19	Komodo	Macang Tanggar	Tanah Longsor	19 Oktober 2022
20	Komodo	Macang Tanggar	Tanah Longsor	19 Oktober 2022
21	Komodo	Gorontalo	Tanah Longsor	19 Oktober 2022
22	Boleng	Mbuit	Angin Puting	24 Desember

No	Lokasi Kejadian Bencana		Jenis Bencana	Tanggal Kejadian
	Kecamatan	Desa		
1	2	3	4	5
			Beliung	2022
23	Boleng	Tanjung Boleng	Banjir	03 Januari 2022
24	Boleng	Beo Sepang	Banjir	23 Februari 2022
25	Boleng	Tanjung Boleng	Tanah Longsor	03 Januari 2022
26	Boleng	Tanjung Boleng	Tanah Longsor	03 Januari 2022
27	Mbeliling	Liang Ndara	Kebakaran	06 Juli 2022
28	Mbeliling	Golo Damu	Kebakaran	13 Desember 2022
29	Sano Nggoang	Wae Sano	Angin Puting Beliung	17 Februari 2022
30	Sano Nggoang	Wae Lolos	Banjir	26 Februari 2022
31	Sano Nggoang	Golo Manting	Banjir	02 Desember 2022
32	Sano Nggoang	Golo Manting	Banjir	12 Desember 2022
33	Sano Nggoang	Wae Sano	Tanah Longsor	17 Februari 2022
34	Sano Nggoang	Golo Ndaring	Tanah Longsor	26 Februari 2022
35	Sano Nggoang	Golo Kempo	Tanah Longsor	28 Februari 2022
36	Sano Nggoang	Nampar Macing	Tanah Longsor	17 Maret 2022
37	Sano Nggoang	Nampar Macing	Tanah Longsor	18 Maret 2022
38	Sano Nggoang	Wae Lolos	Tanah Longsor	6-Nov-22
39	Sano Nggoang	Golo Kempo	Tanah Longsor	03 Desember 2022
40	Welak		Angin Puting Beliung	08 Februari 2022
41	Welak	Watu Umpu	Angin Puting Beliung	25 Mei 2022
42	Welak	Rancang Welak	Banjir	20 Januari 2022
43	Welak	Galang	Banjir	20 Januari 2022
44	Welak	Semang	Tanah Longsor	16 Februari 2022

No	Lokasi Kejadian Bencana		Jenis Bencana	Tanggal Kejadian
	Kecamatan	Desa		
1	2	3	4	5
45	Welak	Wewa	Tanah Longsor	25 Februari 2022
46	Welak	Semang	Tanah Longsor	28 Februari 2022
47	Lembor Selatan	Nanga Lili	Angin Puting Beliung	26 Desember 2022
48	Lembor	Golo Ndeweng	Kebakaran	01 Mei 2022
49	Lembor	Wae Wako	Kebakaran	09 Mei 2022
50	Lembor	Wae Bangka	Kebakaran	30 Juli 2022
51	Lembor	Wae Bangka	Kebakaran	30 Juli 2022
52	Lembor	Ngancar	Tanah Longsor	18 Februari 2022
53	Lembor	Daleng	Tanah Longsor	12 Maret 2022
54	Lembor	Pong Majok	Tanah Longsor	16-Nov-22
55	Ndoso	Raka	Tanah Longsor	05 Januari 2022
56	Ndoso	Momol	Tanah Longsor	05 Januari 2022
57	Macang Pacar	Golo Lajang	Angin Puting Beliung	22-Sep-22
58	Macang Pacar	Sarae Naru	Kebakaran	22 Maret 2022
59	Macang Pacar	Wontong	Kebakaran	05 Oktober 2022
60	Macang Pacar	Rokap	Tanah Longsor	02 Januari 2022
61	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
62	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
63	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
64	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
65	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
66	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
67	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	16 Februari 2022
68	Macang Pacar	Benteng Ndope	Tanah Longsor	26 Februari 2022
69	Macang Pacar	Pacar	Tanah Longsor	26 Februari

No	Lokasi Kejadian Bencana		Jenis Bencana	Tanggal Kejadian
	Kecamatan	Desa		
1	2	3	4	5
	Pacar			2022
70	Kuwus	Golo Lewe	Banjir , Tanah Longsor	16 Februari 2022
71	Kuwus	Golo Wedong	Kebakaran	06 Mei 2022
72	Kuwus		Kebakaran	18 Mei 2022
73	Kuwus	Sama	Kebakaran	15 Desember 2022
74	Kuwus	Kolang	Tanah Longsor	28 Juni 2022
75	Kuwus	Golo Ruu	Tanah Longsor	02 Agustus 2022
76	Kuwus	Golo Lewe	Tanah Longsor	2-Nov-22
77	Kuwus	Lawi	Tanah Longsor	17-Nov-22
78	Kuwus	Golo Ruu	Tanah Longsor	25 Desember 2022
79	Kuwus	Golo Lewe	Tanah Longsor	26 Desember 2022

Sumber : BPBD Kab.Manggarai Barat Tahun 2022

7. Tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis, diukur dengan indikator kinerja utama
- Indeks Reformasi Birokrasi
 - Kontribusi PAD (juta rupiah)

Tabel.2.3.20

Realisasi dan capaian tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	53,79	82,75
2	Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	339.650	190.816	56,180
Rata –rata capaian					69,47

Sumber : Kementerian PANRB ,BKAD dan Bapenda Kab.Manggarai Barat Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja pada tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis pada tahun 2022 sebesar 69,47% (sedang). Analisis realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- *Indeks Reformasi Birokrasi*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB simpulan evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah 53,79 dengan kategori CC, rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3.21
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN		BOBOT	NILAI 2022
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>
A	KOMPONEN PENGUNGKIT			
	I.	PEMENUHAN	20,00	10,74
	II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)	10,00	5,01
	III.	REFORM	30,00	7,98

	TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT	60	23,73
B.	KOMPONEN HASIL		
	1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35
	2 Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,74
	3 Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Kkn	10,00	8,13
	4 Kinerja Organisasi	10,00	5,84
	TOTAL KOMPONEN HASIL		30,06
	INDEKS REFORMASI (PENGUNGKIT + HASIL	100,00	53,79

Sumber : Kementerian PANRB tahun 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja

- b. Hasil antara area perubahan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 7 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector* dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.2.3.22
Hasil Antara Area Perubahan
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	ASN yang profesional	0-100	31,89	BKN
2	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0-5	3,01	Kementerian PANRB
3	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	27,6	LKPP
4	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,52	Kementerian PANRB
5	Maturitas SPIP	0-5	2	BPKP

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6	Kapabilitas APiP	0-5	2	BPKP
7	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	70,5	Ombudsman RI

Sumber : Kementerian PANRB tahun 2022

- c. Komponen Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai Barat memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.3.23
Komponen Hasil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

N o	Hasil Antara	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Opini BPK (3)	Opini	WTP	BPK
2	Nilai SAKIP (7)	0-100	62,16	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	87,4	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	81,28	SPI eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	74,14	SPI eksternal oleh KPK

Sumber : Kementerian PANRB tahun 2022

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 53,79 dari target 65 dengan tingkat capaian 82,75 % , predikat **tinggi**

- *Kontribusi PAD (juta rupiah)*

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD sendiri bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

Jenis-jenis PAD menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah :

1. Pajak daerah, adalah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kontribusi wajib kepada daerah yang terutang (UU No. 28 tahun 2009).
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 tahun 2009).
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lain-lain PAD yang sah, serta terdiri atas (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

Tabel.. 2.3.24
 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

URAIAN		REALISASI (Rp)
<i>1</i>		<i>2</i>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190.816.711.963,02
Pajak Daerah		141.461.757.403,65
1	Pajak Hotel	33.843.923.278,00
2	Pajak Losmen	203.217.298,00
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	228.645.000,00
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya	21.356.695.239,07
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.006.720.671,00
6	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.128.647.557,00
7	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	114.359.790,00
8	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	9.061.250,00
9	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	80.583.500,00
10	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	610.369.880,00
11	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	538.153.367,00
12	Pajak Reklame Kain	33.758.593,00
13	Pajak Reklame Melekat/Stiker	385.008.046,01
14	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.548.974.318,00
15	Pajak Parkir	301.174.775,00
16	Pajak Air Tanah	34.125.630,00
17	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	25.604.810.458,57
18	PBBP2	9.211.154.453,00
19	BPHTB-Pemindahan Hak	36.222.374.300,00
20	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00
Retribusi Daerah		41.417.841.264,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.770.685.198,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.479.572.000,00

URAIAN		REALISASI (Rp)
<i>1</i>		<i>2</i>
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	196.430.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	85.161.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.175.537.132,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	699.127.100,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan	635.115.000,00
9	Retribusi Terminal	36.627.000,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	31.248.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	101.555.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	627.200.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.436.060.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.005.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.769.038.834,00
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	299.480.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.720.173.212,00
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.720.173.212,00
Lain-lain PAD yang Sah		5.216.940.083,37
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	558.214.000,00
2	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	540.000,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.030.740.827,83
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	67.936.633,40
5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	6.584.307,11
6	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	3.532.035,87
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	538.549.852,19
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	73.380.622,00

URAIAN		REALISASI (Rp)
1		2
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	150.638.921,00
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.223.548.594,66
11	Pendapatan Denda Pajak Hotel	16.292.507,00
12	Pendapatan Denda Pajak Restoran	28.583.911,00
13	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.430.498,00
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.959.098,00
15	Pendapatan Denda Pajak Parkir	558.096,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	64.122.164,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	68.071.770,00
18	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	451.470.007,31
19	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	926.786.238,00

Sumber : Dinas BKAD dan Dinas Pendapatan Kab, Manggarai Barat tahun 2022

Kontribusi PAD (juta rupiah) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 190.816 dari target 339.650 dengan tingkat capaian 56,180 %, predikat **rendah**.

8. Meningkatnya kemandirian desa, diukur dengan indikator kinerja utama *Indeks Desa Membangun (IDM)*

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan

yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Tabel.. 2.3.25

Nilai Rata-Rata IDM Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2022

No	Nama Kecamatan/Kabupaten	Nilai Rata-Rata IDM Kecamatan dan Kabupaten	Status IDM Kecamatan dan Kabupaten 2022
1	2	3	4
1	Mbeliling	0.6288	Berkembang
2	Komodo Berkembang	0.6280	Berkembang
3	Lembor	0.6202	Berkembang
4	Lembor Selatan	0.6150	Berkembang
5	Pacar	0.6029	Berkembang
6	Sano Nggoang	0.5940	Tertinggal
7	Boleng	0.5914	Tertinggal
8	Kuwus	0.5899	Tertinggal
9	Macang Pacar	0.5594	Tertinggal
10	Ndoso	0.5585	Tertinggal
11	Kuwus Barat	0.5546	Tertinggal
12	Welak	0.5467	Tertinggal
Kabupaten Manggarai Barat		0,5922	Tertinggal

Sumber:Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi tahun 2022

Tabel. 2.3.26

Realisasi dan capaian tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	--------	-----------	---------

	1	2	3	4	5
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6074	0,5922	97,50

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi tahun 2022

Indeks Desa Membangun Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 realisasi 0,5922 dari target 0,6074 dengan tingkat capaian 97,50 % , predikat **sangat tinggi**

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel. 2.3.27

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	-	-	58,20
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63,89	64,17	64,92
3	Prevalensi Stunting	Persen	19,06	15,1	15,9
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	57,54	58,46	58,46
5	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	0,9	1,29	4,12
6	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	13,77	13,91	14,72
7	Indeks Gini	Angka	0,367	0,339	0,340
8	Tingkat kemiskinan	Nilai	17,71	17,92	17,15
9	Tingkat pengangguran terbuka	Nilai	3,72	4,94	4,91
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	-	-	70,47
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	165,57	165,02	151,62
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	52,31		53,79
13	Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	87,450	154.767	190.816

14	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0.5574	0,5686	0,5922
----	-----------------------------	-------	--------	--------	--------

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;

Tabel.. 2.3.28
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD 2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)	
		2022	2022			
1	2	3	4	5	6	
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	60	58,2	70	83,14
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,42	64,92	68,10	95,33
3	Prevalensi Stunting	Persen	17,06	15,9	9,06	56,98
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	67,24	58,46	73,76	79,26
5	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,76	4,12	6,19	66,56
6	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	13,4	14,72	16,6	88,67
7	Indeks Gini	Angka	0,34	0,34	0,308	-10289,6
8	Tingkat kemiskinan	Nilai	16,18	17,15	14,01	77,59
9	Tingkat pengangguran terbuka	Nilai	3,51	4,91	3,07	40,07
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,69	70,47	76,81	91,75
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	161,7	151,62	158,02	104,05
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	53,79	77	69,86

13	Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	339.650	190.816	1.306.799	14,60
14	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6074	0,5922	0,7074	83,72

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

e. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Kabupaten dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur;

Tabel.. 2.3.29

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
antar Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2022		
			Manggarai Barat	Manggarai	Manggarai Timur
1		2	3	4	5
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	58,2	-	-
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64,92	65,83	62,3
3	Prevalensi Stunting	Persen	15,9	16,24	18,1
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	58,46	64,58	51,16
5	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4,12	2,21	3,74
6	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,728	15,725	13,001
7	Indeks Gini	Angka	0,340	0,291	0,276
8	Tingkat kemiskinan	Nilai	17,15	19,84	25,35
9	Tingkat pengangguran terbuka	Nilai	4,91	3,50	1,89
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,47	72,98	-
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	151,62	149,56	156,93
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,79	53,27	45,14

13	Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	190.816	110,629	33,086
14	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,5922	0.6187	0.6291

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;

Capaian Kinerja APBD Kabupaten Mangarai Barat tahun 2022 masuk dalam Katagori **Tinggi**, ini dilihat dari komponen APBD Pendapatan Daerah tercapai 94,37% atau sebesar Rp. 1.255.702.963.532,58 dari pagu target pendapatan sebesar Rp. 1.330.686.744.398 realisasi belanja 94,46% dari realisasi sebesar Rp. 1.494.257.748.969,32 dari target belanja sebesar Rp. 1.581.873.367.077,00, realisasi Pembiayaan sebesar 100,15% atau Rp. 251.560.815.271,55 atas rencana pagu anggaran pembiayaan sebesar Rp. 251.186.622.679,00

Secara rinci Realisasi APBD Kabupaten Mangarai Barat tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel. 2.3.30
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mangarai Barat Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.330.686.744.39	1.255.702.963.5	94,37
	8,00	32,58	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.356.435.716,00	190.816.711.963,0	76,83
		2	
Pajak Daerah	182.374.604.134,00	141.461.757.403,6	77,57
		5	
Retribusi Daerah	52.650.585.944,00	41.417.841.264,00	78,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.720.173.212,00	2.720.173.212,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.611.072.426,00	5.216.940.083,37	49,17
PENDAPATAN TRANSFER	1.021.462.504.330,	1.004.881.194.004	98,38
	00	,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	992.705.134.094,00	980.316.261.187,0	98,75
		0	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.757.370.236,00	24.564.932.817,00	85,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.867.804.352,00	60.005.057.565,56	98,58

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1		2	3	4
	Pendapatan Hibah	13.975.449.352,00	14.536.876.920,00	104,02
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.892.355.000,00	45.468.180.645,56	96,96
BELANJA DAERAH		1.581.873.367.07	1.494.257.748.9	94,46
		7,00	69,32	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		620.871.548.032,00	608.096.973.973,0	97,94
			0	
	Belanja Pegawai	377.556.575.509,00	371.273.510.538,0	98,34
			0	
	Belanja Bunga	8.471.765.932,00	7.038.707.835,00	83,08
	Belanja Hibah	18.575.402.050,00	18.184.280.000,00	97,89
	Belanja Tidak Terduga	5.979.104.141,00	3.173.879.600,00	53,08
	Belanja Bagi Hasil	13.929.599.000,00	12.067.494.600,00	86,63
	Belanja Bantuan Keuangan	196.359.101.400,00	196.359.101.400,0	100,00
			0	
BELANJA LANGSUNG		961.001.819.045,00	886.160.774.996,3	92,21
			2	
	Belanja Barang dan Jasa	428.254.387.848,00	392.897.335.453,3	91,74

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
1		2	3	4
			2	
	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.245.404,00	38.845.232.335,00	97,11
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.980.290.249,00	159.623.544.220,0	98,55
			0	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	328.417.976.752,00	292.362.220.356,0	89,02
			0	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.348.918.792,00	2.432.442.632,00	103,56
SURPLUS / DEFISIT		(251.186.622.679,00)	(238.554.785.436,74)	94,97
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.027.531.679,00	256.560.815.271,55	99,05
			5	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.027.531.679,00	9.027.531.679,55	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	247.533.283.592,0	99,01
			0	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.840.909.000,00	5.000.000.000,00	63,77
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.840.909.000,00	-	0,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
PEMBIAYAAN NETTO	251.186.622.679,00	251.560.815.271,55	100,15
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	13.006.029.834,81	0,00

Sumber : BKAD Kab.Manggarai Barat Tahun 2022

Berikut capaian Kinerja keuangan perangkat daerah Tahun 2022, berdasarkan urusan tersaji pada tabel berikut :

Tabel. 2.3.31
Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	1.581.873.367.077,00	1.494.280.238.969,32	(87.593.128.107,68)	94,46
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.012.665.814.905,00	950.769.379.078,32	(61.896.435.826,68)	93,89
Pendidikan	287.617.645.219,00	282.580.023.601,52	(5.037.621.617,48)	98,25
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	287.617.645.219,00	282.580.023.601,52	(5.037.621.617,48)	98,25

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Olahraga				
Kesehatan	297.744.066.202,00	284.491.306.030,80	(13.252.760.171,20)	95,55
Dinas Kesehatan	297.744.066.202,00	284.491.306.030,80	(13.252.760.171,20)	95,55
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	397.165.120.822,00	354.946.511.767,00	(42.218.609.055,00)	89,37
Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	36.831.265.294,00	35.505.088.099,00	(1.326.177.195,00)	96,40
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.481.147.820,00	9.997.901.923,00	(483.245.897,00)	95,39
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	360.333.855.528,00	319.441.423.668,00	(40.892.431.860,00)	88,65
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.408.469.576,00	13.802.122.497,00	(606.347.079,00)	95,79
Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang	4.641.468.556,00	4.517.740.316,00	(123.728.240,00)	97,33
Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan	9.767.001.020,00	9.284.382.181,00	(482.618.839,00)	95,06
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.520.491.951,00	10.374.134.938,00	(146.357.013,00)	98,61
Satuan Polisi Pamong Praja	7.405.917.140,00	7.334.814.532,00	(71.102.608,00)	99,04
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.114.574.811,00	3.039.320.406,00	(75.254.405,00)	97,58
Sosial	5.210.021.135,00	4.575.280.244,00	(634.740.891,00)	87,82
Dinas Sosial	5.210.021.135,00	4.575.280.244,00	(634.740.891,00)	87,82

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	84.481.185.866,00	80.274.669.729,00	(4.206.516.137,00)	95,02
Tenaga Kerja	3.608.456.708,00	3.535.634.229,00	(72.822.479,00)	97,98
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	3.608.456.708,00	3.535.634.229,00	(72.822.479,00)	97,98
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	444.310.000,00	430.205.000,00	(14.105.000,00)	96,83
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	444.310.000,00	430.205.000,00	(14.105.000,00)	96,83
Pangan	5.285.091.092,00	5.208.317.211,00	(76.773.881,00)	98,55
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.285.091.092,00	5.208.317.211,00	(76.773.881,00)	98,55
Pertanahan	170.255.000,00	81.280.200,00	(88.974.800,00)	47,74
Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	170.255.000,00	81.280.200,00	(88.974.800,00)	47,74
Lingkungan Hidup	10.705.505.600,00	10.331.460.174,00	(374.045.426,00)	96,51
Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.705.505.600,00	10.331.460.174,00	(374.045.426,00)	96,51
Administrasi Kependudukan dan Capil	4.030.320.556,00	4.004.182.897,00	(26.137.659,00)	99,35
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.030.320.556,00	4.004.182.897,00	(26.137.659,00)	99,35
Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.321.495.159,00	10.227.897.413,00	(93.597.746,00)	99,09
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.321.495.159,00	10.227.897.413,00	(93.597.746,00)	99,09
Pengendalian Penduduk dan Keluarga	10.733.561.320,00	8.291.422.940,00	(2.442.138.380,00)	77,25

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Berencana				
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.733.561.320,00	8.291.422.940,00	(2.442.138.380,00)	77,25
Perhubungan	1.500.024.190,00	1.324.831.495,00	(175.192.695,00)	88,32
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	1.500.024.190,00	1.324.831.495,00	(175.192.695,00)	88,32
Komunikasi dan Informatika	6.062.961.619,00	5.717.482.122,00	(345.479.497,00)	94,30
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.062.961.619,00	5.717.482.122,00	(345.479.497,00)	94,30
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.698.546.200,00	8.610.654.576,00	(87.891.624,00)	98,99
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	8.698.546.200,00	8.610.654.576,00	(87.891.624,00)	98,99
Penanaman Modal	3.925.098.729,00	3.760.400.225,00	(164.698.504,00)	95,80
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.925.098.729,00	3.760.400.225,00	(164.698.504,00)	95,80
Kepemudaan dan Olah Raga	2.844.079.870,00	2.834.873.897,00	(9.205.973,00)	99,68
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.844.079.870,00	2.834.873.897,00	(9.205.973,00)	99,68
Statistik	96.307.000,00	75.475.380,00	(20.831.620,00)	78,37
Dinas Komunikasi dan Informatika	96.307.000,00	75.475.380,00	(20.831.620,00)	78,37
Persandian	44.080.000,00	44.079.647,00	(353,00)	100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	44.080.000,00	44.079.647,00	(353,00)	100,00
Kebudayaan	1.802.030.821,00	1.766.666.473,00	(35.364.348,00)	98,04

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	1.802.030.821,00	1.766.666.473,00	(35.364.348,00)	98,04
Perpustakaan	11.110.017.300,00	11.040.863.922,00	(69.153.378,00)	99,38
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.110.017.300,00	11.040.863.922,00	(69.153.378,00)	99,38
Kearsipan	3.099.044.702,00	2.988.941.928,00	(110.102.774,00)	96,45
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.099.044.702,00	2.988.941.928,00	(110.102.774,00)	96,45
Urusan Pilihan	92.078.333.317,00	86.847.937.214,00	(5.230.396.103,00)	94,32
Kelautan dan Perikanan	2.652.324.140,00	2.602.371.489,00	(49.952.651,00)	98,12
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.652.324.140,00	2.602.371.489,00	(49.952.651,00)	98,12
Pariwisata	7.223.566.029,00	6.843.716.243,00	(379.849.786,00)	94,74
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	7.223.566.029,00	6.843.716.243,00	(379.849.786,00)	94,74
Pertanian	65.349.931.152,00	61.230.449.734,00	(4.119.481.418,00)	93,70
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	43.626.036.328,00	41.679.196.721,00	(1.946.839.607,00)	95,54
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21.723.894.824,00	19.551.253.013,00	(2.172.641.811,00)	90,00
Perdagangan	3.681.777.796,00	3.532.150.491,00	(149.627.305,00)	95,94
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.681.777.796,00	3.532.150.491,00	(149.627.305,00)	95,94
Perindustrian	13.015.773.000,00	12.484.822.607,00	(530.950.393,00)	95,92
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.015.773.000,00	12.484.822.607,00	(530.950.393,00)	95,92
Transmigrasi	154.961.200,00	154.426.650,00	(534.550,00)	99,66
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,	154.961.200,00	154.426.650,00	(534.550,00)	99,66

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Koperasi dan UKM				
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	392.648.032.989,00	376.388.252.948,00	(16.259.780.041,00)	95,86
Administrasi Pemerintahan	41.413.163.826,00	39.256.260.606,00	(2.156.903.220,00)	94,79
Sekretariat Daerah	41.413.163.826,00	39.256.260.606,00	(2.156.903.220,00)	94,79
Pengawasan	5.800.814.051,00	5.468.565.128,00	(332.248.923,00)	94,27
Inspektorat	5.800.814.051,00	5.468.565.128,00	(332.248.923,00)	94,27
Perencanaan	6.483.987.179,00	6.178.733.673,00	(305.253.506,00)	95,29
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.483.987.179,00	6.178.733.673,00	(305.253.506,00)	95,29
Keuangan	261.637.502.239,00	251.824.975.416,00	(9.812.526.823,00)	96,25
Badan Keuangan dan Aset Daerah	253.572.903.726,00	244.262.160.509,00	(9.310.743.217,00)	96,33
Badan Pendapatan Daerah	8.064.598.513,00	7.562.814.907,00	(501.783.606,00)	93,78
Kepegawaian	6.988.443.173,00	6.364.255.775,00	(624.187.398,00)	91,07
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.988.443.173,00	6.364.255.775,00	(624.187.398,00)	91,07
Pendidikan dan Pelatihan	1.008.546.000,00	986.917.390,00	(21.628.610,00)	97,86
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.008.546.000,00	986.917.390,00	(21.628.610,00)	97,86
Penelitian dan Pengembangan	406.081.200,00	404.505.621,00	(1.575.579,00)	99,61
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	406.081.200,00	404.505.621,00	(1.575.579,00)	99,61
Sekretariat DPRD	39.265.054.934,00	37.983.947.923,00	(1.281.107.011,00)	96,74

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Sekretariat DPRD	39.265.054.934,00	37.983.947.923,00	(1.281.107.011,00)	96,74
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	24.278.047.588,00	22.777.032.808,00	(1.501.014.780,00)	93,82
Kecamatan Komodo	4.089.151.320,00	3.806.077.754,00	(283.073.566,00)	93,08
Kecamatan Boleng	1.750.440.280,00	1.611.128.398,00	(139.311.882,00)	92,04
Kecamatan Mbeliling	1.870.322.024,00	1.735.262.486,00	(135.059.538,00)	92,78
Kecamatan Sano Nggoang	1.658.655.937,00	1.600.332.167,00	(58.323.770,00)	96,48
Kecamatan Lembor	3.246.866.890,00	3.177.196.122,00	(69.670.768,00)	97,85
Kecamatan Welak	1.936.668.759,00	1.835.375.709,00	(101.293.050,00)	94,77
Kecamatan Lembor Selatan	1.638.534.118,00	1.477.226.703,00	(161.307.415,00)	90,16
Kecamatan Kuwus	2.201.631.888,00	2.074.590.127,00	(127.041.761,00)	94,23
Kecamatan Macang Pacar	1.619.631.232,00	1.474.854.638,00	(144.776.594,00)	91,06
Kecamatan Ndosu	1.278.307.152,00	1.148.958.090,00	(129.349.062,00)	89,88
Kecamatan Kuwus Barat	1.357.956.968,00	1.313.519.099,00	(44.437.869,00)	96,73
Kecamatan Pacar	1.629.881.020,00	1.522.511.515,00	(107.369.505,00)	93,41
Kesatuan Bangsa dan Politik	5.366.392.799,00	5.143.058.608,00	(223.334.191,00)	95,84
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.366.392.799,00	5.143.058.608,00	(223.334.191,00)	95,84
PEMBIAYAAN DAERAH				
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Keuangan				
Badan Keuangan dan Aset Daerah				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.027.531.679,00	256.560.815.271,55	(2.466.716.407,45)	99,05
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.027.531.679,00	9.027.531.679,55	0,55	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
Penerimaan Pinjaman Daerah	250.000.000.000,00	247.533.283.592,00	(2.466.716.408,00)	99,01
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.840.909.000,00	5.000.000.000,00	(2.840.909.000,00)	63,77
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.840.909.000,00	0,00	(2.840.909.000,00)	0,00

Sumber : BKAD Kab.Manggarai Barat Tahun 2022

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efisiensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Penghitungan analisis efisiensi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja utama dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian indikator kinerja utama yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efisiensi. Analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.. 2.3.32

Analisis Efisiensi Sumber Daya Dan Kinerja
Kabupaten Mangarai Barat Tahun 2022

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas									
1	Meningkatnya Manfaat Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah	1	Indeks Pariwisata Inklusif	97					
				1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.754.110.758	1.477.453.190		TE
				2	Program Pemasaran Pariwisata	442.824.644	435.469.232		TE
				3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	276.087.400	272.110.380		TE
				4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	786.053.300	778.081.900		TE
				5	Program Pengembangan Kebudayaan	1.552.296.279	1.525.718.173		TE
				6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	72.598.100	64.033.800		TE
				7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	177.136.442	176.914.500		TE

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas									
2	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia (Ipm)	100,8					
		3	Prevalensi Stunting	106,8					
				8	Program Pengelolaan Pendidikan	97.870.248.131	94.952.838.696	2.917.409.435	3,07
				9	Program Pengembangan Kurikulum	159.572.100	150.269.288	9.302.812	6,19
				10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	549.999.870	544.539.097	5.460.773	1,00
				11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.444.080.000	1.440.334.800	3.745.200	0,26
				12	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	850.000.000	850.000.000	-	-
			13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	192.416.255.724	173.687.258.836	18.728.996.888	10,78	

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.914.132.72 6	18.618.669.26 3	4.295.463.463	23,07
			15	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	217.825.000	204.440.000	13.385.000	6,55
			16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.255.470.050	1.211.284.000	44.186.050	3,65
			17	Program Pembinaan Perpustakaan	11.110.017.30 0	11.040.863.92 2	69.153.378	0,63
			18	Program Pengendalian Penduduk	258.003.200	256.974.300	1.028.900	0,40
			19	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.297.876.000	3.552.211.516	745.664.484	20,99
			20	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.119.160.000	623.017.500	1.496.142.500	240,14
3	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	86,94				
			21	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	222.515.000	220.615.000		TE
			22	Program Perlindungan Perempuan	23.925.000	21.615.000		TE

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			23	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66.450.000	63.760.000		TE	
			24	Program Perlindungan Khusus Anak	131.420.000	124.215.000		TE	
Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal									
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	71,53					
		6	PDRB Per Kapita	109,85					
				25	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.313.560.000	2.313.200.000	360.000	0,02
				26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	333.580.000	333.579.496	504	0,00
				27	Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.420.000	35.420.000	-	-
				28	Program Pengawasan Keamanan Pangan	147.696.840	142.142.000	5.554.840	3,91
			29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	20.519.701.681	18.477.520.433	2.042.181.248	11,05	

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pertanian				
			30 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.071.184.833	22.310.340.529	760.844.304	3,41
			31 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	641.915.000	565.081.122	76.833.878	13,60
			32 Program Penyuluhan Pertanian	4.350.001.519	3.668.814.834	681.186.685	18,57
			33 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.375.113.095	2.215.788.947	159.324.148	7,19
			34 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.949.505.000	1.907.161.000	42.344.000	2,22
			35 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	566.162.140	561.362.989	4.799.151	0,85
			36 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	122.861.400	121.536.500	1.324.900	1,09
			37 Program Perizinan Usaha Pertanian	79.405.000	78.782.400	622.600	0,79
			38 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	630.619.540	607.652.543	22.966.997	3,78

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			39	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	225.310.000	224.810.000	500.000	0,22
			40	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	112.586.000	63.976.000	48.610.000	75,98
			41	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	5.900.000	5.900.000	-	-
			42	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.932.568.000	12.405.967.607	526.600.393	4,24
			43	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	51.890.000	51.040.000	850.000	1,67
			44	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	31.315.000	27.815.000	3.500.000	12,58
			45	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	53.760.000	46.715.372	7.044.628	15,08
			46	Program Promosi Penanaman Modal	212.657.270	206.508.534	6.148.736	2,98
			47	Program Pelayanan Penanaman Modal	188.195.300	185.914.736	2.280.564	1,23
			48	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	426.571.000	374.175.500	52.395.500	14,00

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program		Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4		5	6	7	8
			49	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20.181.500	19.234.600	946.900	4,92
	7 Indeks Gini	101,8						
			50	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	38.091.500	38.091.500	-	-
			51	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	78.050.000	71.238.600	6.811.400	9,56
			52	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	7.239.919.200	7.179.500.401	60.418.799	0,84
			53	Program Pengembangan Umkm	1.342.485.500	1.321.824.075	20.661.425	1,56
	8 Tingkat Kemiskinan	91,35						
	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	60,11						
			54	Program Perencanaan Tenaga Kerja	29.740.000	29.505.000		TE
			55	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	467.494.400	467.104.125		TE

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			56	Program Penempatan Tenaga Kerja	207.890.300	207.315.092	TE	
			57	Program Hubungan Industrial	76.780.000	76.448.756	TE	
			58	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	54.301.200	54.099.500	TE	
			59	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100.660.000	100.327.150	TE	
			60	Program Rehabilitasi Sosial	1.141.425.000	1.137.945.000	TE	
			61	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	21.761.700	21.721.100	TE	
			62	Program Penanganan Bencana	1.489.476.800	918.007.200	TE	
			63	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	52.310.000	52.310.000	TE	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan								
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	108,93				
			64	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	511.440.000	449.082.000	62.358.000	13,89
			65	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	96.620.000	47.560.200	49.059.800	103,15

Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			66	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	94.500.000	76.950.000	17.550.000	22,81
			67	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	55.880.000	20.928.000	34.952.000	167,01
			68	Program Pengelolaan Persampahan	8.143.888.000	8.033.466.192	110.421.808	1,37
6	Menurunkan Risiko Bencana	11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	106,2				
			69	Program Penanggulangan Bencana	450.476.700	450.226.500	250.200	0,06
			70	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	82.148.800	82.013.000	135.800	0,17
			71	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.558.466.900	2.406.591.845	151.875.055	6,31
			72	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	15.498.336.910	14.724.205.636	774.131.274	5,26
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, Dan Melayani								



Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Dinamis	1 2	Indeks Reformasi Birokrasi	82,75					
	1 3	Kontribusi PAD (Juta Rupiah)	56,18					
				73	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	778.235.200	13.406.519.288	TE
				74	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.440.501.627	2.236.676.854	TE
				75	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	233.783.230.573	226.282.216.159	TE
				76	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.048.999.580	2.178.495.901	TE
				77	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.819.242.007	2.459.041.374	TE
				78	Program Kepegawaian Daerah	3.723.274.400	3.307.373.875	TE
				79	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.008.546.000	986.917.390	TE
			80	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	406.081.200	145649000	TE	



Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	8
			81	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.229.068.800	1.144.344.598	TE
			82	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	270.149.600	199.516.700	TE
			83	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	556.408.800	542.738.768	TE
			84	Program Aplikasi Informatika	2.458.699.689	2.226.858.756	TE
			85	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	556.408.800	542.738.768	TE
			86	Program Aplikasi Informatika	2.458.699.689	2.226.858.756	TE
			87	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	96.307.000	75.475.380	TE
			88	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	44.080.000	44.079.647	TE
			89	Program Pengelolaan Arsip	68.662.700	68.659.300	TE
			90	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	66.012.000	65.156.124	TE
			91	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11.522.530.100	10.820.784.999	TE



Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			92	Program Pendaftaran Penduduk	586.187.370	583.460.572		TE
			93	Program Pencatatan Sipil	265.134.600	265.134.600		TE
			94	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	96.650.200	96.478.200		TE
			95	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.330.720.660	6.748.571.035		TE
			96	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.319.824.454	2.202.271.823		TE
			97	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	457.308.571.512	447.586.701.843		TE
			98	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	219.733.900	219.498.000		TE
			99	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.379.605.620	843.667.147		TE
			100	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	219.358.000	202.442.950		TE
8	Meningkatnya	14	Indeks Desa	97,5				
			10	Program Penataan Desa	168.812.900	168.519.360		TE



Misi/Tujuan	Indikator Kinerja Utama	%Capaian Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	Tingkat Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kemandirian Desa	Membangunan (IDM)		1					
			10 2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	25.364.800	25.050.080		TE
			10 3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.327.362.820	6.321.935.453		TE
			10 4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	837.944.800	837.860.404		TE
Jumlah				443.050.603.729	408.984.819.309	34.065.784.420	7,69	

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

*Ket: TE (Tidak Efisiensi)



Dari tabel di atas terdapat 6 dari 14 indikator kinerja utama menunjukkan pencapaian lebih dari 100% dengan tingkat efisiensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 7,69 %. Tingkat efisiensi ini belum menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran belum tentu adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tetapi dimungkinkan kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana dan rendahnya serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

g. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Tabel.. 2.3.33
Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN
1	2
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	
	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
	3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
13	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
	1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
	2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
15	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
17	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
18	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
19	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
21	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
23	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
24	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
25	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
26	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
27	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
28	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
29	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
30	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
31	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
32	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
33	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
	2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
34	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
35	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	
	1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
36	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
37	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
38	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
39	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
41	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
1	Penyimpanan sementara Limbah B3
2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1	Pengelolaan Sampah
43	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
44	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
1	Pelayanan Pencatatan Sipil
45	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
46	PROGRAM PENATAAN DESA
1	Penyelenggaraan Penataan Desa
47	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
48	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
		Kuantitas Penduduk
	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
51	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
	6	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	7	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	8	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
54	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
	1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
	2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
55	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
56	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
57	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
58	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
60	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
61	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
62	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
63	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	1	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>
65	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
66	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
71	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
72	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
73	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>
74	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
75	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
76	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
77	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
78	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
79	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
80	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
81	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
82	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
83	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	1	Pembangunan Prasarana Pertanian
84	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
85	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
86	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
	1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
87	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
88	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	1	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
89	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
90	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
91	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
92	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
93	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
94	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
95	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
96	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
97	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	1	Administrasi Tata Pemerintahan
	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
98	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
99	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	4	Peningkatan Kapasitas DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	
	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	6	Fasilitasi Tugas DPRD
100	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
101	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
102	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
103	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
104	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
105	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	2	Mutasi dan Promosi ASN
	3	Pengembangan Kompetensi ASN
	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
106	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

NO	PROGRAM/KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>
107	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
109	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2	Pendampingan dan Asistensi
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
111	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
112	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
114	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>
115	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
116	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
117	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
118	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
119	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
12	Penataan Organisasi
13	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	
	14	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	15	Layanan Administrasi DPRD

Sumber : Data diolah Bagian Organisasi Setda Kab.Manggarai Barat

**BAB
III**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN**

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai Barat tidak melaksanakan atau tidak ada tugas pembantuan yang diberikan oleh pusat.

3.1 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

No.	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab./ Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(Urusan Pertanian)	SP.DIPA.01803.4.249158/2022, tanggal 02 Maret 2022	Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas	Manggarai Barat	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan						
			a. Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Bantuan Benih Padi Inbrida Sawah Seluas 2000 Ha			550,000,000	550,000,000	100	100 (Luas tanaman 2000 ha, Provititas 62,52 Kw/Ha total produksi 12.504,48 ton)	100	
			b. Kawasan Serealialainnya Bantuan Budidaya Sorgum Seluas 50 Ha			65,500,000	65,500,000	100	100 (Luas tanam 50 Ha	100	
			c. Kegiatan Kawasan Padi Kaya Gizi			942,000,000	942,000,000	100	100 (Luas Tanam	100	

			(Biofortifikasi) seluas 600 Ha						600 Ha, Provititas 62,29 Kw/Ha, Produksi 3.737,50 ton		
			d. Kegiatan Area Penyaluran Benih Jagung Bantuan Benih Jagung Hibrida seluas 500 ha			315,000,000	315,000,000	100	100 (Luas tanam ha, provitas 49,65 Kw/Ha, total produksi 2,022,50 ton	100	
			Jumlah			1,872,500,000	1,872,500,000	100	100	100	
2	(Urusan Pertanian)	SP.DIPA.01803 .4.249158/202 2, tanggal 02 Maret 2022	Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas			153.495.000	153.495.000	100	100	100	
			Kegiatan pembangunan Embung Pertanian, Pembangunan Irigasi perpompan menengah mendukung Hortilultura, Pemabangan Irigasi Perpompaan Besar Mendukung Tanaman Pangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RIT), Rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian, Evaluasi Alat dan Mesin Pertaniandan Penyusunan E RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			2,071,615,000	2,053,615,000	99,14	99,14	99,14	

3.2 Permasalahan dan Kendala.

Pada tahun 2022 ditemukannya permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas pembantuan antara lain :

1. Tidak disediakan bantuan saprodi lainnya seperti pupuk dan obat-obatan dan biaya pengawalan dan pendampingan kegiatan
2. Gagal tumbuh seluas 15,15 ha karena kualitas benih sorgum tidak bagus
3. Tidak disediakan bantuan obat-obatan dan biaya pendampingan dan pengawal kegiatan dilapangan;
4. Untuk Pekerjaan fisik (pembangunan Embung, Irigasi perpompaan dan Rehbilitasi jaringan Tersier Pola Pelaksanaan Pekerjaan berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk Tranver uang kepda kelompok Tani. Pelaksanaan pekerjaan dan pembuatan laporan penggunaan dana dibuat oleh kelompok tani. Sumber daya petani dalam percepatan penyelesaian laporan berdampak pada terlambatnya penyelesaian BAP dan BAST.

3.3 Solusi

1. Cost Sharing APBD II Kabupaten untuk pengadaan pupuk dan obat-obatan, Penanggulangan OPT serta biaya pendampingan dan pengawalan kegiatan di lapangan
2. Meminta penyedia/rekanan Pemerintah untuk mengganti benih Sorgum dan mendorong petani agar melakukan penangkaran Sorgum sehingga tidak tergantung benih dari luar daerah
3. Cost Sharing APBD II Kabupaten untuk pengadaan Obat-obatan penanggulangan OPT serta biaya pendampingan dan pengawalan kegiatan di lapangan
4. Pendampingan dan fasilitasi pembuatan laporan dan pertanggungjawaban kepada kelompok tani.

A. Bidang Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Pendidikan Anak Usia Dini: Usia 5 (lima) s/d 6 (enam) tahun;
- Pendidikan Dasar: Usia 7 (tujuh) s/d 15 (lima belas) tahun;
- Pendidikan Kesetaraan: Usia 7 (tujuh) s/d 18 (delapan belas) tahun

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Pencapaian SPM Pendidikan oleh Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2022	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2022
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%		

3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%		

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 42.204.931.177,-	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp. 244.120.000,-	DAK Fisik, dan DAU
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp. 386.074.300,-	DAK Fisik, dan DAU
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp.363.579.250,-	DAK Fisik, dan DAU
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 920.189.000,-	DAK Fisik, DAU
	Pembangunan Sarana dan Peralatan dan Utilitas Sekolah	Rp. 1.092.139.100,-	DAK Fisik, DAU
	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas	Rp. 610.000.000,-	DAK Fisik, DAU
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp.1.960.000.000,-	Dak Fisik, DAU
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp.-	DAK Non Fisik- BOS Reguler
	Pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa	Rp. 14.920.000.000,-	DAK Fisik, DAU
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Rp. 563.056.026,-	DAU
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Rp. 17.750.000,-	DAU
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Rp. 6.287.525.000,-	DAU, DAK

	Kependidikan bagi satuan Pendidikan sekolah Dasar		Non Fisik
	Pengembangan Karier Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah Dasar	Rp.116.205.000,-	DAU, Dak Non Fisik
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 393.019.500,-	DAU
	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Rp. 18.494.805.028,-	DAK DAU
2.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 3.471.134.670,-	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 88.467.050,-	DAK Fisik, DAU
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp. 412.536.950,-	DAK Fisik, DAU
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp. 2.114.280.000,-	DAK Non Fisik- BOP PAUD
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp. 10.000.000,-	DAK Fisik, DAU
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	Rp. 108.291.400,-	DAU
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Rp. 115.481.800,-	DAU, DAK Non Fisik
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 622.077.470,-	DAU
3.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	Rp. 3.471.134.670,-	DAU, Dak Non Fisik
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 255.000.000,-	DAK Non Fisik
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	Rp. 363.195.000,-	DAK Non Fisik
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Rp. 25.000.000,-	DAU, DAK Non Fisik
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan	Rp.180.316.400,-	DAU
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan di pendidikan non formal/kesetaraan	Rp. 241.703.300,-	DAU
	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 40.633.000,-	DAU, DAK Non Fisik

4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik personil Dinas Pendidikan maupun tenaga Pendidik. Adapun dukungan

personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2	2 Orang	
		S1	21 Orang	
		D4	-	
		D3	6 Orang	
		DI	-	
		SPG	-	
		SMA	6 Orang	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2	-	
		S1	12 Orang	
		D4	-	
		D3	1 Orang	
		D2	2 Orang	
		SMA	7 Orang	

Sumber : Data Pegawai Dinas PKO tahun 2022

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	10.583 Orang	3.924 Orang	6.659 Orang	37,08%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Buku Gambar	10.583 Buah	2558 Buah	8025 Buah	24,17%
	Alat Mewarnai	10.583 Buah	2558 Buah	8025 Buah	24,17%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	10.583 Buah	2558 Buah	8025 Buah	24,17%
	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi SI/D-IV	190 Orang	12 Orang	178 Orang	6,32%

	Kualitas Pendidik yang berkualifikasi SI/D-IV	369 Orang	40 Orang	329 Orang	10,84%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	52.121 Orang	49.611 Orang	2510 Orang	95,18%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Buku Teks Pelajaran	52.121 Buah	33.585 Buah	18.536 Buah	64,44%
	Perlengkapan Belajar	52.121 Buah	20.124 Buah	31.997 Buah	38,61%
	Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi SI/D-IV	359 Orang	320 Orang	39 Orang	89,14%
	Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga admin, Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/Sederajat	359 Orang	139 Orang	220 Orang	38,72%
	Jumlah Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan	2137 Rombongan	2137 Rombongan	0 Rombongan	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	49.758 Orang	49.758 Orang	0 Orang	100%
	Kualitas Pendidik yang berkualifikasi SI/D-IV	4182 Orang	3823 Orang	359 Orang	91,42%
	Satuan Pendidikan yang berakreditasi Minimal C	359 Sekolah	222 Sekolah	137 Orang	61,84%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
	Presentase Pencapaian Penerima	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	

Layanan Dasar				
Penerima Layanan	180 Orang	180 Orang	0 Orang	100%
Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
Modul Belajar	180 Buah	140 Buah	40 Buah	77,78%
Jumlah Rombongan Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	58 Rombongan	58 Rombongan	0 Rombongan	100%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	180 Orang	140 Orang	40 Orang	77,78%
Kualitas Pendidik yang berkualifikasi SI/D-IV	49 Orang	49 Orang	0 Orang	100%
Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi SI/D-IV	9 Orang	6 Orang	3 Orang	66,67%
Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga admin, Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/Sederajat	9 Orang	1 Orang	8 Orang	11,11%
Perlengkapan Belajar	180 Buah	140 Buah	40 Buah	77,78%
PKBM Terakreditasi Minimal C	9 PKBM	1 PKBM	8 PKBM	11,11%

Sumber: Dinas PKO tahun anggaran 2022

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala dan Permasalahan

- Ketersediaan data yang kurang menunjang dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan PAUD;
- Belum maksimalnya Satuan Pendidikan memahami dan memanfaatkan DAPODIK sebagai sumber data pendidikan secara nasional, sehingga keputusan yang diambil oleh pemangku

kepentingan ataupun pihak lain yang memanfaatkan DAPODIK sebagai sumber data untuk perencanaan belum maksimal;

- Belum terealisasinya 1 Desa 1 PAUD;
- Keterbatasan Anggaran mengakibatkan upaya peningkatan kualitas guru belum maksimal.

b. Solusi Permasalahan

- Melakukan upaya pendataan sasaran PAUD,
- Ketersediaan Anggaran untuk melakukan sosialisasi cara pengisian DAPODIK yang benar kepada semua Satuan Pendidikan;
- Mendorong Pemerintah Desa dan Stakeholder lainnya untuk membuka Lembaga PAUD;
- Mendorong Guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru secara mandiri, antara lain melalui Pelatihan Profesi Guru (PPG), dan Guru Penggerak.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan Ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang

melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Pencapaian SPM Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2022	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2022
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
4.	Pelayanan kesehatan Balita	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%

7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	jumlah layanan hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)	jumlah pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100 %	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan Tata Cara Pemenuhan	100 %

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 3.549.805.000,-	DAU dan DAK Non Fisik



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 1.600.115.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 4.200.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 27.200.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 622.360.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 90.320.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 819.100.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 50.400.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 41.200.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 44.700.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 195.890.000,-	DAU dan DAK Non Fisik
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 54.320.000,-	DAU dan DAK Non Fisik

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lampiran 6 Evaluasi R- APBD

4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik personil Dinas Kesehatan maupun tenaga kesehatan. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 SI DIV SMA SMP	3 Orang 124 Orang 18 Orang 19 Orang -	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 SI DIV SMA SMP	- 90 Orang 9 Orang 70 Orang 11 Orang	

Sumber: Data Pegawai Dinas Kesehatan tahun 2022

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	6127 Orang	4386 Orang	1739 Orang	71,62 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	6127 buah	4386 buah	1741 buah	71,58%
	Tablet tambah darah	6127 buah	4386 buah	1741 buah	71,58%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	22 paket	22 paket	0 paket	100%
	Kartu ibu/rekam medis ibu	6127 Orang	4386 buah	1741 buah	71,58%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	6127 Orang	4386 buah	1741 buah	71,58%
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	5848 Orang	4780 Orang	1068 Orang	81,74%

	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Formulir Partograf	5848 buah	4780 buah	1068 buah	81,74%
	Kartu ibu (rekam medis)	5848 buah	4780 buah	1068 buah	81,74%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	5848 buah	4780 buah	1068 buah	81,74%
	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100 %
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	4880 Orang	4763 Orang	117 Orang	97,60 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Vaksin Hepatitis B0	4880 Orang	4763 Buah	117 Buah	97,60%
	Vitamin K1 injeksi (PKBM)	4880 Orang	4763 Buah	117 Buah	97,60%
	Salep/tetes mata antibiotik	4880 Orang	4763 Buah	117 Buah	97,60%
	Formulir bayi baru lahir	4880 Orang	4763 Buah	117 Buah	97,60%
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	4880 Orang	4763 Buah	117 Buah	97,60%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4880 Orang	4763 Buah	117 Buah	97,60%
	Dokter/dokter spesialis Anak	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100 %
4.	Pelayanan kesehatan Balita	jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
	Presentase Pencapaian	Jumlah yang harus	Jumlah yang	Jumlah yang belum	

	Penerima Layanan Dasar	dilayani	terlayani	Terlayani	
	Penerima Layanan	34.031 Orang	21.094 Orang	12.937 Orang	61,98 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Vitamin A Biru	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Vitamin A Merah	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	34.034 Orang	21.094 Buah	12.940 Buah	61,97 %
	Peralatan Anafilaktik	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Dokter	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100 %
	Ahli Gizi	446 Orang	446 Orang	0 Orang	100%
	Guru PAUD	369 Orang	40 Orang	329 Orang	10,84%
	Kader Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
5.	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	16.032 Orang	15.481 Orang	551 Orang	96,56%



	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Buku raport kesehatan	16.032 Buah	0 Buah	16.032 Buah	0,00 %
	Buku pemantauan kesehatan	16.032 Buah	0 Buah	16.032 Buah	0,00 %
	Kuesioner skrining kesehatan	16.862 Buah	16.032 Buah	0 Buah	100%
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Dokter/Dokter gigi	71 Orang	71 Orang	0 Orang	0,00%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100 %
	Ahli Gizi	22 Orang	20 Orang	2 Orang	90,91%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	43 Orang	30 Orang	13 Orang	69,77%
	Guru	41 Orang	41 Orang	0 Orang	100%
	Kader Kesehatan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	172.622 Orang	137.741Orang	34.881 Orang	79,79%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	164.418 Buah	131.598 Buah	32.820 Buah	80,04%
	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%

	ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes				
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	164.418 Buah	131.598 Buah	32.820 Buah	80,04%
	Dokter	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100%
	Ahli Gizi	22 Orang	20 Orang	2 Orang	90,91%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	43 Orang	30 Orang	13 Orang	69,77%
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	24.735 Orang	12.155 Orang	12.580 Orang	49,14%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	24.735 Buah	12.155 Buah	12.580 Buah	49,14%
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	24.735 Buah	12.155 Buah	12.580 Buah	49,14%
	Buku kesehatan lansia	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Dokter	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%

	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100%
	Ahli Gizi	22 Orang	20 Orang	2 Orang	90,91%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	43 Orang	30 Orang	13 Orang	69,77%
	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	jumlah layanan hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	2034 Orang	2034 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Tensimeter	42 Buah	42 Buah	0 Buah	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Dokter	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	43 Orang	30 Orang	13 Orang	69,77%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	jumlah Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	3188 Orang	3092 Orang	96 Orang	96,98%
	Presentase Pencapaian mutu	Jumlah Mutu Barang/Jasa	Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	

	Minimal Layanan Dasar	yang dibutuhkan	Barang/Jasa yang Tersedia	Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	3188 Buah	3092 Buah	96 Buah	96,99%
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Dokter	71 Orang	71 Orang	0 Orang	100%
	Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
	Perawat	569 Orang	569 Orang	0 Orang	100%
	Ahli Gizi	22 Orang	20 Orang	2 Orang	90,91%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	43 Orang	30 Orang	13 Orang	69,77%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	584 Orang	574 Orang	10 Orang	98,29%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%

	Kit berisi 2 Alat Fiksas	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	480 Buah	395 Buah	85 Buah	82, 29%
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	1015 Orang	1015 Orang	0 Orang	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	2034 Orang	2034 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Reagen Zn TB	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	2034 Buah	2034 Buah	0 Buah	100%
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2034 Buah	2034 Buah	0 Buah	100%
	Catridge tes cepat molekuler	22 Buah	1 Buah	21 Buah	4,55%
	Formulir pencatatan dan pelaporan	2034 Buah	2034 Buah	0 Buah	100%
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter	4 Orang	4 Orang	0 Orang	100%

	spesialis paru				
	Perawat	597 Orang	569 Orang	28 Orang	95,31%
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	56 Orang	56 Orang	0 Orang	0,00%
	Penata Rontgen	11 Orang	8 Orang	3 Orang	72,73%
	Tenaga kesehatan masyarakat	43 Orang	30 Orang	13 Orang	69,77%
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)	jumlah pelayanan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	74.022 Orang	4667 Orang	69.335 Orang	6,30%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	4687 Orang	4687 Orang	0 Orang	100%
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	22 Buah	0 Buah	22 Buah	0,00%
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan	22 Buah	22 Buah	0 Buah	100%

pelaksana, Nomor KTP/NIK				
Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2 Orang	2 Orang	0 Orang	100 %
Perawat	735 Orang	735 Orang	0 Orang	100%
Bidan	375 Orang	375 Orang	0 Orang	100%
Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	56 Orang	56 Orang	0 Orang	100%
Tenaga kesehatan masyarakat	61 Orang	61 Orang	0 Orang	100%
Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2022

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Proses Pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal terutama dalam hal ketepatan waktu laporan serta kurangnya pemahaman akan definisi operasional dari masing-masing indikator.
- Kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Kesehatan di kabupaten Manggarai Barat.
- Belum adanya pengelola atau penanggungjawab khusus pelaporan SPM di tingkat Puskesmas.
- Perhitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program SPM Bidang belum dilakukan secara baik.

b. Solusi Permasalahan

- Meningkatkan kualitas SDM kesehatan dengan berbagai pelatihan.
- Laporan SPM dibuat dan dikirim langsung dari Puskesmas ke Pengelola SPM Kabupaten. Menunjuk pengelola SPM di tingkat Puskesmas.
- Perencanaan penganggaran dan perhitungan kebutuhan SPM Bidang Kesehatan menggunakan Aplikasi Siscobikes (system costing biaya kesehatan).

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
Penerima pelayanan dasar adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
Penerima pelayanan dasar adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

2. Target capaian SPM oleh Daerah

Pencapaian SPM Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2016-2021) sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2022	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2022
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Jumlah barang dan jasa	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	Jumlah barang dan jasa	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.292.120.000,-	Dau, Dak Fisik
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp. 11.292.120.000,-	Dau, Dak Fisik
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.151.870.000,-	Dau, Dak Fisik
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rp. 4.151.870.000,-	Dau, Dak Fisik

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lampiran 6 Evaluasi R- APBD

4. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 S1 DIV SMA SMP	2 Orang 18 Orang 10 Orang 9 Orang -	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 DIV SMA SMP	- 8 Orang 2 Orang 10 Orang -	

Sumber: Data Pegawai Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2022

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	11.200 Orang	10.088 Orang	1.112 Orang	90%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	672.000 Liter Per Hari	605.280 Liter Per Hari	66.720 Liter Per Hari	90%
	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
	Jaringan perpipaan	2800 SR	2522 SR	278 SR	90%
Jaringan bukan perpipaan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	4000 Orang	2044 Orang	1956 Orang	51,1%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	250 m3	250 m3	0 m3	100%	
Kualitas pelayanan air limbah domestic	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	

Sub-Sistem pengolahan setempat	1 Unit	1 Unit	0 Unit	100%
Sub-sistem pengangkutan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1396 Orang	1396 Orang	0 Orang	100%

Sumber: Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Tata Ruang Tahun 2022

6. Kendala Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan:

- Masalah sosial: dalam pelaksanaan kegiatan air minum, yang menjadi kendala sosial yaitu terkait dengan pembebasan lahan untuk jaringan perpipaan dan pembangunan bak reservoir. Banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan lahan. Hal ini kemudian yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan air minum;
- Masalah sumber daya: dalam pelaksanaan kegiatan air minum, sering kali terjadi di lapangan terkait dengan kekurangan debit air dari mata air yang ditentukan;
- Masalah manajemen: setelah pelaksanaan paket pekerjaan air minum, desa terkait sering kewalahan dalam melakukan manajemen pemeliharaan terkait dengan air minum tersebut.

b. Solusi Permasalahan:

- Masalah sosial: masalah ini diatasi dengan melakukan mediasi terhadap beberapa warga yang terdampak pembangunan.
- Masalah sumber daya: masalah ini diatasi dengan mencari sumber mata air lainnya untuk menambah debit air.
- Masalah manajemen: masalah ini diatasi dengan melakukan sosialisasi terkait dengan pola manajemen yang baik untuk dilakukan.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.

Pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2022	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2022
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Jumlah barang dan jasa	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Jumlah barang dan jasa	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

3. Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 20.664.800,-	DAU, DAK Fisik
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 20.664.800,-	DAU, DAK Fisik
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 1.051.450.300,-	DAU, DAK Fisik
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 1.051.450.300,-	DAU, DAK Fisik

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lampiran 6 Evaluasi R- APBD

4. Dukungan Personil.

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Perumahan rakyat di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik.

Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2 S1 DIV SMA SMP	2 Orang 18 Orang 10 Orang 9 Orang -	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 DIV SMA SMP	- 8 Orang 2 Orang 10 Orang -	

Sumber: Data Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

5. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	27 Orang	27 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	27 Orang	27 Orang	0 Orang	100%
2.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
Penerima Layanan	161 Orang	0 Orang	161 Orang	0%	

Presentase Pencapaian Minimal Dasar	mutu Layanan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
Fasilitasi Hak Atas Tanah Bangunan	penggantian Penguasaan dan/atau	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
Subsidi uang sewa		Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
Penyediaan rumah layak huni		161 Orang	0 Orang	161 Orang	0%

Sumber: Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

6 Kendala Permasalahan dan Solusi:

a. Permasalahan:

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, masalah yang dihadapi yaitu terkait dengan kesiapan warga untuk melakukan swakelola. Banyak penerima bantuan yang kewalahan untuk menambah dana pribadi dalam mendukung program peningkatan kualitas ini akhirnya seringkali terhambat pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

b. Solusi:

Masalah ini dihadapi dengan melakukan sosialisasi serta motivasi kepada masyarakat agar bisa menambah swakelola supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar.

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota.

- Pelayanan Informasi rawan Bencana;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan tempat terjadinya bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran;
Penerima pelayanan dasar adalah warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.

Target Pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (20121-2022) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2022	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2022
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/kota	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi Rawan Bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

3. Anggaran

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.297.307.000,-	DAU
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 736.625.000,-	DAU
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 1.560.682.000,-	DAU
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 23.790.200,-	DAU
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 23.790.200,-	DAU

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 316.536.500,-	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 176.320.000,-	DAU
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 16.800.000,-	DAU
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 123.416.500,-	DAU
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 110.150.000,-	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 32.580.000,-	DAU
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 7.280.000,-	DAU
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 70.290.000,-	DAU
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 82.148.800,-	DAU
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.268.800,-	DAU
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 43.880.000,-	DAU

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lampiran 6 Evaluasi R- APBD

4. Jumlah Personil.

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
SATUAN POLISI PRAJA				
1.	PNS	S2	-	
		S1	14 Orang	
		DIII	3 Orang	
		D IV	-	
		SMA	11 Orang	
		SMP	1 Orang	
		SD	-	

2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 D IV DIII SMA SMP SD	- 25 Orang - 8 Orang 78 Orang - 1 Orang	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.	PNS	S2 S1 D III SMA SMP	- 15 Orang 3 Orang 4 Orang 0 Orang	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2 S1 D III SMA SMP	0 Orang 0 Orang 1 Orang 8 Orang 0 Orang	

Sumber: Data Pegawai Satuan Polisi Praja dan BPBD

5. Hasil Capaian.

Realisasi capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kab/kota			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	117 Orang	117 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan

	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan	Tidak ada Kegiatan
	Standar operasional prosedur Satpol PP	6 SOP	6 SOP	0 SOP	100%
	Standar sarana prasarana Satpol PP	272 Unit	36 Unit	236 Unit	13,23%
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	114 Orang	70 Orang	44 Orang	61,40%
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	5 Standar Pelayanan	5 Standar Pelayanan	0 Standar Pelayanan	100%
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi Rawan Bencana			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	90 Orang	90 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100%
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	169 Desa/Kelurahan	164 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	97,04 %
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	169 Kali	6 Kali	163 Kali	3,6%
	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1.805 Rambu	4Rambu	1.341 Rambu	26,09%

	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	256.269 Jiwa	256.269 Jiwa	0 Jiwa	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	90 Orang	83 Orang	7 Orang	92 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Sarana prasarana penanggulangan bencana	28 Jenis	25 Jenis	3 Jenis	89,29 %
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Pelatihan	0 Pelatihan	7 Pelatihan	0%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	92 Orang	83 Orang	9 Orang	90,22 %
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 Sistem Komando	1 Sistem Komando	0 Sistem Komando	100 %
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	92 Jiwa	92 Jiwa	0 Jiwa	100%
	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	69 Respon Cepat	20 Respon Cepat	49 Respon Cepat	28 %

	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0 Respon Cepat	0 Respon Cepat	0 Respon Cepat	100%
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3 kali	3 kali	3 Kali	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	Penerima Layanan	1351 Orang	1351 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	17 Kejadian	17 Kejadian	0 Kejadian	100%
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2 SOP	2 SOP	0 SOP	100%
	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	10 Unit	3 Unit	7 Unit	30%
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	18 Orang	9 Orang	9 Orang	50%

Sumber: Satpol PP dan BPBD Tahun 2022

6. Kendala Permasalahan dan Solusi.

- Permasalahan:
 - Kurangnya Alokasi Anggaran Bencana terutama berkaitan dengan sosialisasi, pelatihan mitigasi.
 - Recofusing anggaran
 - Kurangnya kualitas SDM penanganan Bencana
 - Kurangnya Sarana Prasarana pendukung Penanggulangan Bencana

- Solusi:
Penambahan Anggaran baik alokasi DAU maupun dari bantuan lembaga-lembaga peduli bencana, LSM siap siaga yang merupakan Mitra BNPB.

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah.

Pencapaian SPM Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada dokumen Perencanaan RPJMD periode (2021-2026) sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Penerima Layanan Dasar	Target 2022	Mutu Minimal Layanan Dasar	Target 2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial di luar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial dilluar panti	100%	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat	100 %	Jumlah barang, jasa dan Sumber Daya Manusia	100%

Sumber: RPJMD periode 2021-2026

3. Alokasi Anggaran.

Alokasi Anggaran dalam penerapan SPM Sosial Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 679.725.000,-	DAU
	Penyediaan Permakanan	Rp. 104.600.000,-	DAU
	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 75.650.000,-	DAU
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 1.000.000,-	DAU
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 498.475.000,-	DAU
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 1.341.386.800,-	DAU
	Penyediaan Makanan	Rp. 1.046.475.000,-	DAU
	Penyediaan Sandang	Rp. 294.911.800,-	DAU

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lampiran 6 Evaluasi R- APBD

4. Dukungan Personil.

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Sosial di Kabupaten Manggarai Barat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal baik. Adapun dukungan personil sebagai berikut:

No	Personil	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	S2	1 Orang	
		S1	12 Orang	
		D3	3 Orang	
		SMA	2 Orang	
2.	Tenaga Kontrak Daerah	S2	0 Orang	
		S1	4 Orang	
		D3	1 Orang	
		SMA	4 Orang	

Sumber: Data Pegawai Dinas Sosial tahun 2022

5. Hasil Capaian.

Realisasi capaian SPM bidang Sosial Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/output			Total Pencapaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	113 Orang	113 Orang	0 Orang	98,28%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Layanan data dan pengaduan	1 Website	1 Website	0 Website	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan

rehabilitasi sosial dasar diluar Panti				
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Penyediaan permakanan	113 Paket	113 Paket	0 Paket	100%
Penyediaan sandang	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Penyediaan alat bantu	113 Unit	27 Unit	86 Unit	23,89%
Penyediaan perbekalan kesehatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	113 Unit	53 Orang	60 Orang	46,90%
Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	113 Unit	53 Orang	60 Orang	46,90%
Akses ke layanan pendidikan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Layanan rujukan	113 Orang	53 Orang	60 Orang	46,90%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan



2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Layanan data dan pengaduan	1 Website	1 Website	0 Website	100%
	Penyediaan permakanan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan sandang	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan alat bantu	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Akses ke layanan pendidikan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Layanan rujukan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	

	rehabilitasi sosial dasar diluar Panti				
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
	Penerima Layanan	80 Orang	80 Orang	0 Orang	100%
	Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
	Layanan data dan pengaduan	1 Website	1 Website	0 Website	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan permakanan	80 Paket	80 Paket	0 Paket	100%
	Penyediaan sandang	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan

	Penyediaan alat bantu	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan perbekalan kesehatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Akses ke layanan pendidikan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Layanan rujukan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti			

Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
Penerima Layanan	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	100%
Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
Layanan data dan pengaduan	1 Website	1 Website	0 Website	100%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
Penyediaan permakanan	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
Penyediaan sandang	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
Penyediaan alat bantu	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
Penyediaan perbekalan kesehatan	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis

	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
	Akses ke layanan pendidikan	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
	Layanan rujukan	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis	Tidak Ada gelandangan dan Pengemis
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat			

Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	
Penerima Layanan	552 Orang	475 Orang	77 Orang	86%
Presentase Pencapaian mutu Minimal Layanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	
Penyediaan permakanan	552 Paket	475 Paket	77 Paket	86%
Penyediaan sandang	552 Paket	475 Paket	77 Paket	86%
Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan
Pelayanan dukungan Psikososial	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan	Tidak Ada Kegiatan

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2022

6. Kendala Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Verifikasi data, monitoring dan evaluasi kegiatan belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran (rasionalisasi 2021);
- Verifikasi data serta pendampingan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran (rasionalisasi 2021);
- Verifikasi data tidak bisa dilaksanakan secara spesifik dan pemberian bantuan permakanan hanya bisa dilakukan untuk 1 kali pemberian (paket) karena keterbatasan anggaran yang disediakan (rasionalisasi 2021);
- Belum ada data terkait Gelandangan dan Pengemis untuk Kabupaten Manggarai Barat;
- Monitoring, evaluasi dan pendampingan belum bisa dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana darurat bencana serta keterbatasan anggaran yang disediakan (rasionalisasi 2021).

b. Solusi.

- Menyalurkan bantuan berdasarkan permohonan yang masuk serta

meningkatkan koordinasi dengan perangkat desa tempat penerima bantuan bermukim;

- Untuk sementara hanya bisa melaksanakan pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan menyiapkan perencanaan yang tepat untuk kegiatan tahun selanjutnya;
- Meningkatkan koordinasi dengan Pekerja Sosial dan aparat desa terkait untuk melaksanakan verifikasi data penerima serta menyiapkan juknis dan perencanaan yang lebih baik serta tepat sasaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya;
- Mengoptimalkan penyaluran bantuan CBP untuk masyarakat korban bencana dan tetap melaksanakan pengadaan bantuan bahan bangunan rumah sesuai dengan anggaran yang ada.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 ini menjawab ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang memuat laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran meliputi Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Laporan Tugas Pembantuan, Laporan Tugas Umum Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

pedomaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah terutama Capaian kinerja Pemerintah Daerah Output dan Outcome dari urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama berjalan. dengan kemudahan yang diberikan, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memenuhi target capaian walaupun dengan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, SDM serta hambatan lainnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini diharapkan mampu memberikan gambaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 yang menjadi bahan evaluasi dari Pemerintah Pusat dalam bentuk penilaian sebagai bahan perbaikan dan upaya dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun yang akan datang sehingga sinergitas dapat terwujud. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini akan disampaikan kepada Gubernur sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah yang selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah.

Akhir kata, Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 ini dapat bermanfaat terhadap proses evaluasi dan memberikan gambaran terhadap upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah tercinta ini.

Labuan Bajo, 30 Maret 2022

 **KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

STASIVUS ENDI, SE